

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kurikulum 2013

1. Pengertian Kurikulum

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam pendekatan humanis 2013, perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian kurikulum. Membicarakan kurikulum adalah membahas tentang segala hal yang berkenaan dengan konteks pendidikan, baik tentang rencana pembelajaran, media, isi pelajaran. Kurikulum membantu peserta didik membangun interaksi dan komunikasi dalam rangka *transferring* dan *sharing* pembelajaran. Upaya menciptakan komunikasi yang kondusif dalam pembelajaran adalah untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan kurikulum berfungsi sebagai alat pendidikan. Karena itu, kurikulum dikembangkan dengan bertolak pada kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini kurikulum mempunyai sejumlah program untuk diberikan kepada peserta didik yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam menghadapi masa depan. Program yang dimaksud ada yang tertulis dan ada yang dirancang sebagai tata aturan bahkan ada yang tersembunyi (*hidden curriculum*).

Kurikulum tersembunyi yaitu suatu pengalaman yang tersaji sedemikian rupa tetapi tidak termasuk sebagai yang direncanakan seperti wawasan keilmuan yang dimiliki pendidik, sikap dan penampilan pendidik sehari-hari, hubungan pendidik dengan peserta didiknya dan lain-lain yang pada dasarnya dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian peserta didik walaupun tidak ada satu perincian khusus yang mengaturnya secara tertulis.¹

Dapat dikatakan kurikulum tersembunyi berada dalam sikap, kecenderungan dan keinginan pendidik ke mana peserta didik diarahkan

¹Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka, 2006), h. 107.

secara sengaja atau tidak baik untuk mendukung kurikulum itu sendiri. Dalam hal ini agar keinginan peserta didik itu senantiasa mendukung kurikulum secara menyeluruh penting untuk mengetahui kurikulum secara tertulis dalam merefleksikan kurikulum tersembunyi. Untuk itu definisi kurikulum harus dipahami secara mendasar sesuai dengan dasar-dasar pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan program pembelajaran yang dirancang. Setiap program pembelajaran disesuaikan dengan dasar-dasar pokok pendidikan itu sendiri. Cecilia mengemukakan tentang dasar-dasar pendidikan yang merupakan ide pokok dalam melaksanakan pembelajaran dan memahami definisi kurikulum.

The educational foundations and contents, their sequencing in relation to the amount of time available for the learning experiences, the characteristics of the teaching institutions, the characteristics of the learning experiences, in particular from the point of view of methods to be used, the resources for learning and teaching (e.g. textbooks and new technologies), evaluation and teachers' profiles. ([Dasar-dasar pendidikan dan isinya, yang berkaitan dengan jumlah waktu yang tersedia untuk pengalaman belajar, karakteristik guru di dalam lembaga pengajaran, karakteristik dalam pengalaman belajar, kenyataannya dari sudut pandang, metode yang akan digunakan, sumber daya untuk belajar dan mengajar (misalnya buku teks dan teknologi baru), evaluasi dan profil guru)]².

Dasar-dasar pendidikan dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan dan mengembangkan program pembelajaran. Adapun yang termasuk kepada dasar-dasar pendidikan adalah menyangkut seluruh isi dan pengalaman pembelajaran. Salah satu isi yang termasuk dalam dasar-dasar pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum direncanakan untuk membelajarkan peserta didik. Rencana pembelajaran diberikan agar peserta didik mendapat kesempatan belajar sehingga tercapai efektifitas belajar. Kurikulum sebagai bagian dari dasar-dasar pendidikan didalamnya menyangkut pengalaman belajar mampu mengembangkan

²Cecilia Braslavsky, *Paradigm in Latin American Education* (Buenos: Santillana, 1999), h.1.

pengetahuan dan keahlian peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik juga mampu mendukung aktivitas keberhasilan pembelajaran sehingga terpenuhi program pembelajaran yang dirancang lembaga pendidikan. Adapun termasuk program yang dirancang lembaga pengajaran adalah berkenaan dengan keberhasilan lembaga seperti organisatoris yang administratif, tata kelola sekolah yang komunikatif dan bahkan kurikulum yang terarsiparis.

Perlu diperhatikan segala hal berkaitan dengan kurikulum sebagai sub sistem pendidikan. Salah satu yang termasuk komponen kurikulum adalah metode pembelajaran. Melalui metode pembelajaran peserta didik beraktifitas dan berkreasi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Aktifitas yang mumpuni didukung pula oleh sumber belajar yang berteknologi dan berdaya guna tinggi. Sumber belajar yang berdaya guna termasuk kurikulum. Kurikulum dijadikan peserta didik sebagai *resource* dalam mengembangkan materi-materi dan isi pembelajaran. Melalui sumber belajar baik berupa buku teks dan teknologi diupayakan dapat mendukung aktivitas belajar dan menggali potensi peserta didik.

Dengan demikian disimpulkan bahwa dasar-dasar pendidikan dapat dijadikan sebagai pola dasar dan pola tindak dalam merangkum definisi kurikulum. Marry Ellen Weyner menyebutkan:

Do the principles governing learning stop when we switch from a lab to a classroom? All the evidence we know leads us to suspect that generalizations can be made, even though, yes, complexities will arise in the process and some pieces of advice will need to be revised as we learn more. Of course, the data base of research in classroom experiments is not zero, after all, and so far the returns seem promising. What is the downside of applying what we know now, even if the knowledge is not perfect? ([Apakah prinsip-prinsip yang mengatur proses pembelajaran akan berhenti ketika kita mengganti pembelajaran dari laboratorium ke dalam kelas. Semua bukti-bukti yang kita ketahui dapat dijadikan sebagai generalisasi walaupun tentu saja dalam prosesnya hal ini akan menimbulkan masalah dan membutuhkan masukan/jalan keluar jika kita mau lebih banyak belajar lagi, tentu saja data penelitian eksperimen di dalam kelas tidak lagi sia-sia dan sejauh ini hasilnya menjanjikan. Apakah ada sisi buruk atas pengaplikasian apa yang kita ketahui

saat ini, sekalipun jika pengetahuan bukanlah hal yang sempurna?)].³

Prinsip-prinsip pembelajaran mencakup keseluruhan keadaan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Hasil belajar yang dikehendaki di dalam situasi-situasi sekolah ataupun di luar sekolah dapat dijadikan siswa sebagai pengalaman pembelajaran. Suasana pembelajaran yang baik tersebut didukung oleh kurikulum dengan berbagai kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran yang berspesialisasi dan beragam.

Kurikulum yang menekankan pada proses atau pengalaman pembelajaran berhubungan dengan potensi-potensi peserta didik seperti berfikir, berbuat, memecahkan masalah maupun untuk belajar dan berkembang sendiri. Dalam hal ini pendidikan berfungsi menciptakan situasi atau lingkungan yang menunjang perkembangan potensi tersebut. Pembelajaran yang mendukung potensi peserta didik memuat materi ajar dan isi pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa sehingga tercapai efektifitas belajar. Benny Karyadi menyebutkan bahwa kurikulum diartikan dalam dua macam, yaitu:

- a. Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi guna mencapai efektifitas belajar untuk memperoleh ijazah tertentu.
- b. Sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen.⁴

Sejumlah mata pelajaran yang dimaksud adalah yang telah direncanakan oleh peserta didik sesuai dengan yang ditawarkan oleh pihak sekolah. Adanya kesepakatan antara peserta didik dengan pendidik berkenaan dengan mata pelajaran yang telah dirancang pihak sekolah dan peserta didik menyetujuinya pada saat mendaftar ataupun mengisi formulir sebagai salah satu prasyarat menjadi peserta didik. Dalam dunia

³Marry Ellen Weymer, *Applying Science of Learning in Education: Infusing Psychological Science into the Curriculum* (New York: American Psychologist Association, 2014), h. 4.

⁴Benny Karyadi, *Pengembangan Inovasi dan Kurikulum* (Jakarta: Dirjen Binbagais, 1990), h. 2.

pendidikan, istilah kurikulum ditafsirkan dalam pengertian yang berbeda-beda oleh para ahli.

Pendapat Ronald C. Doll “*The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learner gain knowledge and understanding, develop, skills and alter attitudes appreciations and values under the auspice of that school*”. ([Kurikulum sekolah merupakan nilai dan proses baik formal maupun informal di mana siswa mendapatkan ilmu dan pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah sikap dan nilai apresiasi dengan bantuan sekolah]).⁵ Sikap dan nilai dikategorikan termasuk kepada pendekatan humanis. Siswa dalam proses pembelajarannya berusaha mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan berhasil guna sehingga diperoleh nilai yang memuaskan. Pendekatan humanis menyikapi arti pentingnya pemahaman dan pemaknaan bahwa peserta didik mampu lebih maju dan bermutu dibanding pendidik. Pendekatan humanis dalam hal ini diberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengedepankan nilai-nilai kesusilaan dan kemanusiaan. Pencapaian nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan bilamana kurikulum yang dirancang dan diprogram disusun sesuai dengan kebutuhan dan potensi dasar peserta didik.

Pengertian kurikulum lainnya menurut Maurice Dulton adalah: “*The curriculum is now generally considered to be all of the experiences that learners have under the auspices of the school*”. ([Secara umum kurikulum dipahami sebagai pengalaman-pengalaman yang didapatkan siswa di sekolah]).⁶ Pengalaman peserta didik mampu menggali potensi peserta didik sehingga mampu mengikuti program-program pembelajaran. Kurikulum di bawah naungan sekolah telah disusun rapi dan direncanakan sesuai dengan perkembangan peserta didik sehingga mampu diselaraskan dengan pengalaman belajar. Setiap kurikulum yang telah dikelola

⁵Ronald C. Doll, *Curriculum Improvement, Decision Making and Process* (Boston: Allyn and Bacon, 1996), h.15

⁶Maurice Dulton, “*The prepopotion School-to-Work: Career Paths for All*” (NASSD: Butlelin, Januari, 1996), h. 60.

disesuaikan dengan administrasi sekolah. Pengelolaan kurikulum di maksudkan untuk menyamakan visi dan misi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang bersifat aplikatif maupun objektif. Aplikatif yakni mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan dengan pendekatan humanis sesuai potensi dasar siswa dalam aktivitas sehari-hari. Bersifat objektif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam serta etika akademik.

Colin J. Marsh dan George Willis dalam bukunya *Curriculum Alternative Approaches, Ongoing Issues* telah menginventarisasi beberapa definisi kurikulum baik yang bermakna luas maupun sempit, yaitu :

- a. *“Curriculum is such permanent subject as grammar, reading, logic, rhetoric, mathematics, and the greatest books of the western world that best embody essential knowledge”* ([kurikulum adalah semacam subjek permanen seperti tata bahasa, membaca, logika, retorika, matematika, dan mahakarya dunia barat yang sangat baik membubuhkan pengetahuan esensial di dalamnya]).
- b. *“Curriculum is those subjects that are most useful for living in contemporary society”* ([kurikulum adalah subjek-subjek yang sangat berguna untuk hidup di masyarakat kontemporer]).
- c. *“Curriculum is all planned learnings for which the school is responsible”* ([kurikulum adalah semua pembelajaran yang direncanakan dan sekolah yang bertanggung jawab untuk itu]).
- d. *“Curriculum is all the experiences learners have under the guidance of the school”* ([kurikulum adalah seluruh pengalaman pembelajar yang didapatkan di bawah bimbingan sekolah]).
- e. *“Curriculum is all the experiences that learners have in the course of living”* ([kurikulum adalah semua pengalaman yang didapatkan oleh pelajar dalam kehidupannya]).⁷

Makna dari beberapa pengertian kurikulum tersebut membuktikan bahwa kurikulum berawal dari sejumlah potensi dasar peserta didik yang diklasifikasikan dalam golongan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu khusus. Kurikulum merupakan modal dasar bagi peserta didik dalam mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan sehingga peserta didik mampu mengikuti pengalaman-pengalaman yang direncanakan dan diprogramkan.

⁷Colin J. Marsh, George Willis, *Curriculum Alternative Approache, On going Issues* (New Jersey: Merrill Prantice Hall, 1999), h.8-9.

Kemampuan dasar peserta didik seperti bahasa, membaca, logika, retorika, matematika, mampu menghantarkan peserta didik menjadi terampil.

Dengan demikian kurikulum selanjutnya tetap merumuskan betapa pentingnya bidang-bidang tata bahasa, logika, retorika, matematika, sebagai alat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Rumusan kurikulum yang sesuai dengan pengembangan pengetahuan dapat menghasilkan karya yang bernilai dan menguasai dunia. Kurikulum yang dirumuskan dengan baik senantiasa membutuhkan hal-hal yang esensial di dalam kurikulum itu sendiri. Bilamana memperhatikan segala hal yang mendasar dalam rumusan kurikulum peserta didik pun mampu mengikuti setiap hal dan gerak yang sesuai dengan kemajuan masyarakat kontemporer saat ini. Peserta didik yang berhasil mengikuti setiap sikap dan langkah serta kemajuan masyarakat kontemporer tercapailah masyarakat yang mapan dan sesuai dengan pengembangan diri dan tempaan hidup masing-masing pelajar. Keseluruhan pengembangan diri ini pun merupakan peran kurikulum itu sendiri di dalam bimbingan sekolah. Bimbingan sekolah yang mencermati landasan psikologis, organisatoris dan sosiologis hingga humanis. Kurikulum di bawah bimbingan sekolah tersebut berkaitan dengan semua pengetahuan yang ditawarkan bagi peserta didik oleh sekolah. Makna ini mendukung pengertian kurikulum dari kajian terminologis.

Kurikulum menurut pengertian terminologis didefinisikan “sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa dan melalui kurikulum dapat belajar secara efektif guna mencapai tingkatan atau ijazah.”⁸ Tujuan kurikulum untuk mencapai ijazah dimaksudkan melalui kurikulum atau dengan mempelajari sejumlah mata pelajaran diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditentukan dan dalam peraturan sekolah yang telah diprogramkan. Ijazah adalah bukti fisik yang diperoleh peserta didik setelah sejumlah mata pelajaran telah ditempuh dengan waktu yang

⁸Sudirman, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 9.

dijadwalkan. Dalam upaya mengembangkan potensi diri peserta didik ijazah dapat dijadikan sebagai alat. Ijazah yang diterima peserta didik mempunyai banyak prasyarat dan syarat-syarat dalam mengikuti setiap materi pendidikan. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan yang diprogramkan dan yang dibutuhkan.

Dalam hal ini Rene Overly yang dikutip oleh Ariech Lewy mendefinisikan:

*This term to design equally programme for a given subject matter for the entire cycle or even the whole range of cycles. Further, the term curriculum is sometimes used in a wider sense to cover the various educational activities through which the content is conveyed as well as materials used and methods employed.*⁹

Definisi ini menyimpulkan bahwa kurikulum dirancang atau diprogram dengan sejumlah mata pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang dirancang dilaksanakan sesuai dengan aktivitas pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman pembelajaran. Melalui pengembangan kurikulum maka dapat mengembangkan *kognitif afektif* serta *psikomotorik* peserta didik. Adapun yang termasuk dalam kurikulum itu adalah materi, isi, bahan yang dapat dijadikan sebagai aturan-aturan dalam mengikuti program pembelajaran.

Oemar Hamalik mendefinikan kurikulum adalah “memuat isi dan materi pelajaran, sebagai rencana pembelajaran dan pengalaman belajar.”¹⁰ Untuk menciptakan suasana belajar yang efektif serta mencapai tujuan sekolah/lembaga peserta didik sebaiknya mempersiapkan diri dan siap menerima semua aktivitas belajar. Hal yang dilakukan peserta didik dalam menerima aktivitas pembelajaran adalah dengan cara mengikuti keseluruhan kegiatan proses belajar mengajar.

⁹Rene Overly, *The Unstudied Curriculum: Its Impact on Children* (Washington: Association for Supervision, 2003), h. 23.

¹⁰Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 16-17.

Dalam merencanakan dan menyusun kurikulum dipandu oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 bab X Pasal 36 ayat 3 berbunyi:

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.¹¹

Kurikulum menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tersebut mencerminkan bahwa banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun kurikulum yang kesemuanya harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti adanya standar nasional. Setiap lembaga pendidikan yang mengelola proses belajar mengajar harus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar tidak ada diskriminasi dan pendistribusian pembelajaran yang tidak merata. Standar nasional adalah capaian yang menyeluruh oleh setiap peserta didik sehingga mampu mengikuti skala nasional, tanpa membedakan daerah, wilayah, jenis dan jenjang pendidikan. Dengan demikian kurikulum yang diberikan kepada peserta didik pun harus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Untuk itu kurikulum harus sesuai dengan pengalaman, dinamika pengetahuan, teknologi, seni dan sikap pengembangan diri peserta didik.

Krug mengemukakan "*curriculum is given need for studies*"¹² artinya kurikulum adalah semua pengalaman yang diperoleh peserta didik dan dibutuhkan. Pengalaman adalah di bawah bimbingan guru. Pengalaman yang mendukung pembelajaran baik dari segi penguasaan

¹¹Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas* (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 50.

¹²Edward Krug, *Administrating Curriculum Planning* (New York: Harver Publisher, 1997), h. 4.

pengetahuan, pengembangan keterampilan dan juga penanaman nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya Sudijarto dalam Hendyat Soetopo mendefinisikan kurikulum sebagai pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan untuk mencapai efektifitas belajar.¹³

Kurikulum dapat pula didefinisikan sebagai:


- a. Suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah/ perguruan tinggi yang dilaksanakan dari tahun ke tahun.
- b. Bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan pengajaran untuk siswa-siswanya.
- c. Suatu usaha untuk menyampaikan asas dan ciri terpenting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah.
- d. Tujuan-tujuan pengajaran di sekolah, pengalaman belajar, alat-alat belajar dan cara-cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan.
- e. Suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk efektifitas belajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁴

Kurikulum merupakan kompas keberhasilan pembelajaran. Kurikulum menata, mengarahkan dan menghantarkan peserta didik kepada keberhasilan. Peserta didik yang terampil, menguasai pengetahuan dan mengembangkan nilai serta norma-norma dapat mencapai hasil yang baik. Kurikulum dipedomani agar setiap yang dilakukan sesuai dengan langkah yang telah dirancang. Manakala dikerjakan sesuai dengan rancangan sesungguhnya telah melakukan secara baik. Allah menyeru setiap hambanya untuk melakukan dengan baik.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ

¹³Hendyat Soetopo & Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 12.

¹⁴Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993) h. 2.

15  كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ^ط وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahan Q.S Al.Qasas ayat ke 77 sebagai berikut:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan firman Allah Q.S Al.Qashas ayat ke 77 tersebut dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik, dimaknakan peserta didik nantinya mempunyai nilai-nilai luhur yang normatif dan teraplikasi sesuai dengan alquran dan Sunnah. Alquran dan Sunnah merupakan pokok dasar kajian yang tertulis yang harus dipedomani setiap umat. Bila dikaji dalam kajian kurikulum di mana dari beberapa pengertian kurikulum bahwa kurikulum merupakan bahan tertulis, yang dapat direfleksikan alquran dan Sunnah sebagai bahan tertulis yang digunakan oleh tenaga pengajar dan peserta didik menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran.

Dengan demikian usaha untuk menyampaikan segala isi, materi dan bahan tertulis dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan pendidik di sekolah hingga mencapai tujuan. Tujuan-tujuan pengajaran di sekolah, menyangkut hal pengalaman belajar yang menyenangkan, alat-alat belajar yang lengkap dan berguna dan cara-cara penilaian yang objektif yang digunakan dalam pendidikan. Suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk efektivitas belajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dapat memotivasi peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan baik.

¹⁵Q.S. Al-Qashas/28:77.

2. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Indonesia adalah negara yang kaya dengan dinamika, khasanah dan pertumbuhan. Dalam bidang pendidikan Indonesia telah diakui mampu mensejajarkan diri dengan pendidikan di negara lainnya. Hal ini terbukti dari sumber daya pendidikan yang mampu mengutus peserta didik untuk mengikuti beberapa *event* olimpiade ilmu pengetahuan baik dari bidang ilmu-ilmu eksakta dan non eksakta. Indonesia mampu mengikuti perkembangan kemajuan pendidikan dunia karena seluruh warga negara Indonesia sama-sama bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan tata cara pengelolaan pendidikan sesuai dengan peraturan dan kewenangan bangsa.

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan berupaya agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Indikator penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain dari perkembangan kurikulum.

Kurikulum sebagai aset dan indikator dalam menyelenggarakan pendidikan telah berhasil melakukan perkembangan mulai dari sentralisasi, desentralisasi serta otonomi terhadap pendidikan selalu mengalami inovasi. Perkembangan kurikulum tidak terlepas dari usaha pemerintah, pelaksana pendidikan dan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi awal dalam mengatasi rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan di Indonesia yang berakibat pada rendahnya rata-rata kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam konteks persaingan regional dan global.

Perkembangan kurikulum di Indonesia mulai tahun 1947, hingga saat ini tahun 2013. Terjadinya perkembangan kurikulum yang berlangsung di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia mengikuti setiap jejak perubahan zaman. Salah satu indikator perubahan zaman dari aspek pendidikan adalah perkembangan kurikulum dilakukan dengan pengembangan kurikulum yang bersifat mencapai keberhasilan dan kemajuan pendidikan. Perkembangan kurikulum yang dimaksud sesuai dengan potensi peserta didik, kemajuan bangsa dan negara, teknologi yang mutakhir serta kehidupan keberbangsaan yang menyeluruh dan merata dalam ikatan nasionalisme. Adapun faktor-faktor perkembangan kurikulum di Indonesia disebabkan antara lain:

- a. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, hal ini dapat kita lihat awal perubahan kurikulum dari rencana pelajaran 1947 menjadi rencana pelajaran terurai 1952. Awalnya hanya mengikuti atau meneruskan kurikulum yang ada kemudian dikembangkan lagi dengan lebih menfokuskan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari.
- b. Kepentingan politis semata, hal ini sangat jelas terekam dalam pengembangan kurikulum 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi kurikulum 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Secara matematis masa aktif kurikulum 2004 sebelum dirubah menjadi kurikulum 2006 hanya bertahan selama 2 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan perkembangan sebelumnya. Dalam kurun waktu yang singkat ini, kita tidak bisa membuktikan baik tidaknya sebuah kurikulum.
- c. Tujuan filsafat pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan.
- d. Sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- e. Keadaan lingkungan (*interpersonal, kultural, biokologi, geokologi*).
- f. Kebutuhan pembangunan Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan (POLISOSBUDHANKAM).
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa.¹⁶

¹⁶E.Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2013), h. 22.

Dari masing-masing perkembangan kurikulum yang dialami masyarakat Indonesia mulai dari kondisi politik, filsafat, sosial budaya, senantiasa mengarah kepada perbaikan dari aspek moralitas dan keberagaman. Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia menilik kepada kehidupan dan potensi peserta didik itu sendiri. Kehidupan peserta didik sesungguhnya bukanlah hal yang stagnan dan labil, akan tetapi bersifat humanis, di mana berharap para peserta didik kelak mampu lebih berkarya dan berguna dalam mengikuti pola perkembangan kehidupan. Perkembangan kurikulum selalu mengupayakan adanya perkembangan suasana pembelajaran yang variatif. Kemudian pengembangan pembelajaran yang bersifat kondusif dan efektif. Proses pencapaian perkembangan pendidikan yang dinamis serta pengembangan pendidikan yang aplikatif sesungguhnya dapat dicapai dengan membangun kondisi melalui pendekatan humanis. Pendekatan humanis bertitik tolak dengan memahami kondisi, potensi dan situasi peserta didik sehingga peserta didik lebih mampu dalam mengikuti kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum melalui pendekatan humanis diharapkan dapat menghantarkan peserta didik lebih terarah, memiliki nilai-nilai luhur, penuh etika dan mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi.

Untuk melihat lebih jelas perkembangan kurikulum di Indonesia yang mengedepankan pendekatan humanis dapat ditelusuri sejak tahun 1947 hingga sekarang.

a. Kurikulum tahun 1947 Rencana Pembelajaran

Dilihat dari kondisi kurikulum tahun 1947 awal terbentuknya kurikulum, yang diberi nama rencana pembelajaran 1947.

1). Konsep Kurikulum tahun 1947

Adapun konsep kurikulum 1947 adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Karakter manusia menyangkut tentang nilai-nilai luhur yang harus dimiliki setiap peserta didik. Sebab karakter tersebut adalah kualitas

mental atau moral, kekuatan moral, nama baik atau reputasi, dan karakter itu sendiri merupakan ciri khas yang dimiliki suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu dan merupakan mesin pendorong bagi seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.¹⁷

2). Tujuan Kurikulum Tahun 1947

Tujuan kurikulum 1947 adalah untuk memberikan kesempatan secara menyeluruh kepada rakyat Indonesia memperoleh pendidikan dan pengajaran tanpa kecuali. Hal ini dirasakan masyarakat Indonesia di mana tidak ada diskriminasi dalam memperoleh pendidikan. Warga negara Indonesia dari golongan bangsawan dan pribumi mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Bila dianalisis tujuan kurikulum 1947 ini terdeteksi bahwa pendidikan dalam pendekatan humanis dalam kurikulum dikategorikan memperhatikan pendidikan secara kemanusiaan yakni adanya kesempatan bersama dalam memperoleh pendidikan. Kesempatan tersebut dianalogikan bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan dan pengajaran.

Dari sudut arah dan pandangan, bahwa kurikulum 1947 mengarah kepada mencerdaskan bangsa Indonesia sesuai dengan tuntutan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arah pendidikan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa demikian adanya dengan kurikulum. Kurikulum 1947 sebagai alat dan perantara dalam melakukan proses pembelajaran di setiap lembaga pendidikan baik yang masih dikelola oleh kolonial Belanda ataupun di bawah penyelenggaraan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendekatan humanis, di mana setiap rakyat Indonesia adalah warga negara yang membutuhkan keberhasilan pendidikan, salah satunya adalah masyarakat yang cerdas.

¹⁷Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 11.

Tercapainya konsep, tujuan, arah maka materi yang dituangkan dalam kurikulum 1947 memuat tentang: mata pelajaran Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Berhitung, Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya. Dari berbagai mata pelajaran ini diharapkan masyarakat Indonesia cerdas dan mampu mengikuti perkembangan kemajuan bangsa sehingga masyarakat Indonesia mempunyai semangat dalam kemampuan dan menguasai mata pelajaran. Jika ditilik materi pelajaran pada kurikulum 1947 ini termaktub nilai-nilai humanis di mana masyarakat Indonesia yang mempunyai potensi dapat dikembangkan melalui mata pelajaran. Indonesia yang kaya suku agama dan ras dapat dimaknai dengan memperoleh materi pelajaran sesuai kurikulum 1947. Dengan demikian peserta didik dapat berkembang dan menggali pengetahuan sesuai dengan materi pelajaran yang diperoleh guna menjadi peserta didik yang mampu bersikap dan berbuat.

Di sini jelaslah bahwa kurikulum tahun 1947 berupaya mengorbitkan peserta didik yang mampu bersikap, berujar dan merespon. Sikap yang ditindaklanjuti dengan aktivitas-aktivitas yang nyata merupakan ciri khas dari setiap insan yang melakukan sesuai dengan niatnya. Hal-hal yang dilaksanakan melalui tindakan dan perbuatan sesuai dengan ciri khas khususnya ciri khas bangsa Indonesia yang nasionalis dan berkebangsaan yang mampu mengembangkan karakter ataupun sifat yang mendukung peradaban bangsa Indonesia, sebab karakter merupakan watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak yang ada pada diri seseorang, sering orang menyebutnya dengan tabiat atau perangai. Karakter bangsa Indonesia senantiasa konsisten kepada adat ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai *civilization* dan sosio kultural bangsa. Dengan demikian kurikulum rencana pembelajaran 1947 betul-betul mengutamakan kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan untuk bangsa yang damai penuh dengan kekuatan nilai rasa, karsa dan etika. Dari konsep, tujuan dan arah kurikulum 1947 itu dapat dinyatakan bahwa kurikulum 1947 memiliki orientasi pendekatan yang humanis.

b. Kurikulum Tahun 1952 Rencana Pelajaran Terurai

1). Konsep kurikulum Tahun 1952

Tahun 1952 kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Dengan berganti nama menjadi rencana pelajaran terurai 1952. Ciri kurikulum 1952 yang dijadikan sebagai konsep kurikulum adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep tujuan kurikulum 1952 membuktikan bahwa pendekatan humanis terbangun, di mana isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai dan moral bangsa. Isi pelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yaitu berkonotasi pada perilaku dan budi pekerti sehingga nilai-nilai humanis dapat diterapkan dalam setiap sikap dan perbuatan peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan isi pelajaran yang mempunyai orientasi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tingkah laku baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat hingga di lingkungan manca negara. Untuk itu perlu ditanamkan dalam diri peserta didik sikap terbuka, sikap tanpa pamrih, saling menghormati sehingga dalam setiap kehidupan terpatri dengan nilai-nilai yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang hakiki. Isi pelajaran tersebut memuat materi-materi tentang kehidupan peserta didik yang berakhlakul karimah, bertanggung jawab dan dapat diteladani.

2). Tujuan Kurikulum Tahun 1952

Berawal dari materi pelajaran yang dituangkan kurikulum 1952, maka arah dan tujuan kurikulum 1952 memuat tentang pencapaian keberhasilan dalam mengisi kemerdekaan. Arah kurikulum 1952 menuju kepada pendidikan kebangsaan yang berupaya mengisi kemerdekaan. Adapun tujuan kurikulum 1952 adalah menciptakan masyarakat Indonesia sebagai peserta didik yang mempunyai jati diri sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Disimpulkan bahwa dari konsep, arah dan tujuan serta materi kurikulum 1952 terkandung nilai-nilai humanis di mana masyarakat

digerakkan untuk berjuang. Berjuang bukan untuk melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Dengan demikian pendekatan humanis yang dapat dilakukan adalah sikap semangat dalam mengisi kemerdekaan, sikap patriotisme dan tanggung jawab dalam mencapai masyarakat yang handal dan kuat.

c. Kurikulum Tahun 1964 Rencana Pendidikan

1). Konsep Kurikulum Tahun 1964

Menjelang tahun 1964 pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama rencana pendidikan 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigelan dan jasmani. Program pancawardhana adalah membuktikan nilai-nilai humanis baik secara jasmani dan rohani seyogyanya ditampilkan dalam hidup dan kehidupan peserta didik. Peserta didik diarahkan dan dibimbing memiliki nilai-nilai moral yang luhur seperti mampu menghargai karya orang lain, mempunyai kerja sama yang utuh dan saling menghormati.

2). Tujuan Kurikulum Tahun 1964

Arah dan tujuan kurikulum 1964 adalah meningkatkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Tujuan ini diharapkan tercapai dengan melakukan beberapa hal, antara lain peserta didik harus ditanamkan dengan program panca wardhana. Program ini diajarkan kepada setiap peserta didik dalam setiap lembaga dan termasuk mata pelajaran ataupun materi pelajaran kurikulum 1964. Mata pelajaran ini jelas mendidik bangsa Indonesia agar selalu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa. Arah dan tujuan kurikulum 1964 ini membuktikan bahwa terdapat pendekatan humanis, di mana rakyat Indonesia diharapkan mempunyai satu kesatuan politik budaya dan pertahanan keamanan yang selalu merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

d. Kurikulum Tahun 1968

1). Konsep Kurikulum Tahun 1968

Tahun 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Yaitu perubahan struktur pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pembelajaran diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta pengembangan fisik yang sehat dan kuat. Kolaborasi antara pengetahuan dan spritual diaplikasikan dalam kurikulum 1968 membuktikan rasa nasionalis dan humanis dikembangkan dalam mengisi kemerdekaan. Peserta didik sudah lebih dituntut untuk menjiwai nilai-nilai luhur bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai kekuatan persatuan Indonesia, memiliki rasa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan sosial.

2). Tujuan Kurikulum Tahun 1968

Arah dan tujuan kurikulum 1968 menitikberatkan kepada kecakapan bangsa yaitu mencari jati diri bangsa. Jati diri tersebut tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun alasan kenapa arah tujuan kurikulum 1968 ini disesuaikan dengan Pancasila mengingat bangsa Indonesia baru terbebas dari Gerakan 30 S PKI sehingga rakyat diharapkan tetap meningkatkan sikap patriotisme. Bila dikaitkan dengan pendekatan humanis bahwa kurikulum 1968 menitikberatkan pada nilai-nilai luhur bangsa berlandaskan dasar-dasar pokok agama.

e. Kurikulum Tahun 1975 Sistem PPSI

1). Konsep Kurikulum Tahun 1975

Tahun 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode materi dirinci pada prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran yaitu pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan intruksional

khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum secara humanis penting dievaluasi, setelah peserta didik mendapatkan materi pelajaran diharapkan dapat diimplikasikan dalam kebermaknaan kehidupan siswa. Kualitas peserta didik semakin diarahkan sesuai dengan materi dan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan konsep, arah dan tujuan kurikulum 1975 dibuktikan bahwa pendekatan humanis menekankan pada kemampuan dasar peserta didik. Peserta didik yang mempunyai potensi dan kemampuan dibimbing sesuai dengan tujuan instruksional setiap mata pelajaran. Nilai-nilai humanis yang hendak dicapai adalah peserta didik yang mempunyai kemampuan secara utuh dan khusus. Kemampuan khusus dimaksudkan peserta didik mempunyai satu disiplin ilmu yang benar-benar mampu dikaryakan dan diharapkan dapat mengembangkan diri dan mencapai keberhasilan yang dibanggakan.

f. Kurikulum Tahun 1984 Model CBSA

1). Konsep Kurikulum Tahun 1984

Tahun 1984 mengungkap proses *skill approach*. Meski konsep kurikulum 1984 mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan itu penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1984 yang disempurnakan. Posisi peserta didik ditempatkan sebagai subyek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan model cara belajar siswa aktif (CBSA). Setiap yang diperoleh peserta didik harus secara aktif diharapkan diamalkannya. Peserta didik lebih diarahkan memiliki kemampuan dasar yang dikembangkan di lembaga pendidikan.

2). Tujuan Kurikulum Tahun 1984

Tujuan dan arah yang hendak dicapai adalah peserta didik yang aktif. Aktif dalam kategorisasi pendekatan humanis adalah peserta didik yang mempunyai keahlian sendiri untuk dikembangkan dan diberdayakan sehingga dapat dijadikan format yang bagus bagi peserta didik lainnya.

Peserta didik yang aktif diharapkan menciptakan karya-karya yang mendukung pembelajaran dan meningkatkan profesionalitas bangsa. Dalam hal ini peserta didik telah mampu mengikuti berbagai perlombaan tingkat internasional, sehingga dari aspek humanisnya peserta didik sudah dianggap mampu kreatif dan berdaya saing. Kurikulum 1984 ini sekalipun aspek ilmu dan keahlian ataupun pengembangan pengetahuan lebih ditekankan namun mata pelajaran yang mendukung keahlian tersebut diajarkan sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa.

g. Kurikulum Tahun 1994

1). Konsep Kurikulum Tahun 1994

Tahun 1994 lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, antara pendekatan proses. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya suplemen kurikulum 1994.¹⁸

2). Konsep Kurikulum Tahun 1994

Konsep kurikulum 1994 lebih cenderung merujuk kepada keikutsertaan peserta didik dalam aktif berbuat di dalam proses pendidikan dan pengajaran. Peserta didik diberikan kesempatan penuh dalam mengembangkan potensi dan keahliannya. Potensi yang dimaksud sesuai dengan materi pelajaran yang dipilih sesuai dengan jurusan. Tahun 1994 ini peserta didik diberikan kesempatan memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa sesuai dengan kemampuannya. Dari konsep proses kurikulum 1994 bertujuan menggali potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang digolongkan bangsa yang sedang berkembang, pendidikannya pun disesuaikan dengan perkembangan bangsa. Disimpulkan pendekatan humanis dalam kurikulum 1994 menitikberatkan

¹⁸Zainuddin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 186-192.

kepada kemampuan dalam berspesialisasi berarti pendidikan dan pengajaran diupayakan bermakna dan bersinergi.

h. Kurikulum Tahun 2004 KBK

1). Konsep Kurikulum Tahun 2004 KBK

Tahun 2004, pada era ini kurikulum yang dikembangkan diberi nama kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai peserta didik, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggungjawab. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pendekatan humanis di mana perkembangan kemampuan melakukan tugas-tugas pada standar *performance* tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tersebut. Dengan demikian kurikulum berbasis kompetensi dapat didefinisikan sebagai: seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, kegiatan belajar mengajar, penilaian dan pemberdayaan segala sumber daya pendidikan dalam pencapaian tujuan akhir pendidikan.¹⁹

¹⁹Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagaimana kurikulum sebelumnya merupakan sebuah sistem di mana di dalamnya terdapat komponen yang saling terkait dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen kurikulum terdiri atas: (1) komponen tujuan, (2) komponen isi dan organisasi bahan pelajaran, (3) komponen pola dan strategi belajar mengajar, (4) komponen evaluasi. Tujuan pendidikan menurut kurikulum 2004 dirumuskan dengan hirarkis berikut: (a) tujuan pendidikan nasional, (b) kompetensi lulusan, (c) kompetensi rumpun mata pelajaran, (d) kompetensi mata

Pengembangan kurikulum dengan pendekatan humanis semakin dibuktikan dengan *kognitif, afektif dan psychomotorik*. Di mana hasil belajar dicapai pada tiga ranah tujuan pendidikan, yaitu: *cognitive domain* (ranah kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir, *affective domain* (ranah afektif) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri, *psychomotor domain* (ranah psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin komputer.

2). Tujuan Kurikulum Tahun 2004 KBK

Tujuan diterapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di Indonesia adalah untuk mendongkarak mutu *outcomes* pendidikan dengan cara memberdayakan sekolah/madrasah dalam mengembangkan kompetensi yang akan diberikan pada anak didik sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) berkewajiban meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan hasil pembelajaran siswa yang berkualitas dengan bantuan pembelajaran guru yang berkompeten yang dikelola oleh pihak sekolah. Pemberian wewenang kepada sekolah diharapkan dapat mendorong sekolah melakukan pengambilan keputusan

pelajaran, (e) kompetensi dasar mata pelajaran, (f) indikator hasil belajar. Sebagai perbandingan dalam kurikulum 1994 perjenjangan/hirearkis tujuan pendidikan di Indonesia dirumuskan sebagai berikut: (a) tujuan nasional, (b) tujuan pendidikan nasional, (3) tujuan institusional, (d) tujuan kurikuler, (e) dan tujuan intruksional (TIU-TIK). Tujuan nasional menggambarkan *final goal* didirikannya negara kesatuan RI, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan akhir dari dilaksanakannya pendidikan di Indonesia, tujuan ini dimuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SIKDIKNAS) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tujuan institusional ini sejajar dengan stándar kompetensi lulusan dengan kurikulum 2004. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang akan dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan kurikuler ini sekarang sejajar dengan standar kompetensi mata pelajaran. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang akan dicapai siswa setelah menempuh satuan/pokok bahasan tertentu meliputi tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus (TIK). Tujuan instruksional umum (TIU) sejajar dengan kompetensi dasar (KD), sedang tujuan instruksional khusus (TIK) sejajar dengan indikator.

secara partisipasi. Pengambilan keputusan dengan memperhatikan keuntungan-keuntungan bagi dunia pendidikan.

Sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi (KBK) didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan sebagai berikut:

- a) Peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa sejalan dengan filsafat bangsa, maka peningkatan keimanan dan pembentukan budi luhur merupakan prinsip pertama yang harus diperhatikan oleh para pengembang kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di lapangan. Dengan demikian, prinsip ini harus digali, dipahami dan ditanamkan sehingga mewarnai proses pengembangan kurikulum.
- b) Keseimbangan etika, logika, estetika dan kinestika. Pembentukan manusia seutuhnya merupakan tujuan pendidikan nasional. Manusia yang utuh adalah manusia yang seimbang antara kemampuan intelektual, sikap dan moral serta keterampilannya. Pengembang kurikulum berbasis kompetensi (KBK) harus memperhatikan ketiga keseimbangan itu.
- c) Penguatan integritas nasional, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dengan berbagai ragam latar belakang budayanya. Pendidikan harus dapat menanamkan penanaman penghargaan terhadap perkembangan budaya dan peradaban bangsa yang majemuk sehingga mampu memberikan sumbangan terhadap peradaban dunia.
- d) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) diarahkan agar anak didik memiliki kemampuan berpikir dan belajar dengan cara mengakses, memilih dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh tantangan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- e) Pengembangan kecakapan hidup. Kecakapan hidup mencakup keterampilan diri (*personal skills*), keterampilan berpikir rasional (*thinkings skills*), keterampilan sosial (*social skills*), keterampilan akademik (*academic skills*), keterampilan vokasional (*vocational skills*). Kurikulum mengembangkan kecakapan hidup melalui pembudayaan membaca, menulis, berhitung, sikap dan perilaku adaptif, kreatif, kooperatif dan kompetitif.
- f) Berpijak pada empat pilar pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) mengkoordinasikan fondasi belajar kepada empat pilar pendidikan, yaitu: (1) belajar untuk memahami

- (*learning to know*), (2) belajar untuk berbuat kreatif (*learning to do*), (3) belajar untuk hidup dalam kebersamaan (*learning to life together*), dan (4) belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri (*learning to be*).
- g) Komprehensif dan berkesinambungan. Komprehensif mencakup keseluruhan dimensi kemampuan dan substansi yang disajikan secara berkesinambungan mulai dari usia Taman Kanak-Kanak sampai dengan pendidikan menengah. Kemampuan mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai dan konsep serta fenomena yang berkembang di masyarakat.
 - h) Belajar sepanjang hayat. Pendidikan diarahkan pada proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlanjut sepanjang hayat.²⁰

Di samping prinsip-prinsip pengembangan di atas, kurikulum berbasis kompetensi (KBK) juga didasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Diversifikasi kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- b) Kesamaan dalam memperoleh kesempatan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa melalui kurikulum berbasis kompetensi (KBK) penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap diutamakan. Seluruh peserta didik dari berbagai kelompok seperti kelompok kurang mampu secara ekonomis, kelompok yang memerlukan bantuan khusus, kelompok berbakat dan unggul berhak menerima pendidikan tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya.
- c) Berpusat pada anak. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama dan menilai diri sendiri diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman dan pengetahuannya. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik perlu terus menerus diupayakan. Penilaian berkelanjutan komprehensif menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian usaha tersebut. Penyajiannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak didik melalui, “pembelajaran aktif, kreatif efektif dan menyenangkan (PAKEM)”.
- d) Pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Semua pengalaman belajar dirancang secara menyeluruh dan berkesinambungan

²⁰Nurhadi, *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), h. 83.

mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai tingkat menengah. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah/madrasah, orang tua, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri dan masyarakat secara umum.

- e) Kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) disusun pusat, namun cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah/madrasah. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan pada satuan pendidikan, potensi daerah, peserta didik serta taraf internasional.²¹

Khusus untuk lembaga pendidikan madrasah (Lembaga Pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama), ada satu prinsip lagi dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yaitu “Penciptaan suatu lingkungan yang Islami”, ini dikarenakan madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik ke-Islaman sehingga perlu diciptakan suatu kondisi yang kondusif yang bernuansa Islami. Nilai-nilai Islam diwujudkan dalam kehidupan keseharian madrasah. Penciptaan situasi Islami ini merupakan bagian dari diversifikasi dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di Indonesia.

i. Kurikulum Tahun 2006

1). Konsep Kurikulum Tahun 2006

Tahun 2006, kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk

²¹*Ibid.*, h 4.

kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan.²²

Dalam standar nasional pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh badan standar nasional pendidikan (BSNP). Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- a) Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.
- b) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.²³

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut:

- a) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
- b) Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- c) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan

²²Masnur Muslich, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Pemahaman dan Pengembangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 11-16.

²³*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Guru dan Dosen* (Bandung: Fokus Media, 2006), h. 75.

ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.²⁴

2). Tujuan KTSP

Secara umum tujuan diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus tujuan diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah untuk:

- a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
- b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
- c) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.²⁵

Memahami tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dapat dipandang perlu sebagai suatu pola pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum dalam konteks otonomi daerah yang sedang digulirkan dewasa ini. Oleh karena itu, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) perlu diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, terutama berkaitan dengan tujuh hal sebagai berikut:

- a) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
- b) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.²⁶

²⁴E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 20.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

- c) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
- d) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
- e) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
- f) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
- g) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat, serta mengakomodasinya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).²⁷

j. Kurikulum Tahun 2013 KPKB

1). Konsep Kurikulum Tahun 2013 KPKB

Tahun 2013, sebelum mengenal lebih rinci tentang kurikulum 2013 penting juga kiranya memaparkan hal-hal yang terlingkup di dalam kurikulum 2013 khususnya tentang pendekatan humanis sebagai salah satu esensi yang menonjol dalam kurikulum 2013. Mulai tahun ajaran 2013/2014, atau tepatnya Juli 2013 yang lalu, pemerintah mengimplementasikan kurikulum baru yang disebut kurikulum perikat kesatuan bangsa (KPKB) atau kurikulum 2013. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur sejumlah kebijakan demi kebaikan dan keteraturan warga negaranya. Pemerintah sudah mengatur kebijakan-kebijakan yang salah satunya adalah tentang pendidikan. Kurikulum sebagai salah satu dari kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dalam pendidikan dalam hal ini oleh menteri pendidikan. Dalam dunia pendidikan kurikulum memegang kedudukan kunci, sebab berkaitan

²⁷*Ibid.*

dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan.

Diberlakukan kurikulum 2013 merupakan respons atas berbagai kondisi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa kurikulum 2013 adalah jawaban atas ancaman disintegrasi bangsa yang mewujud dalam berbagai pertikaian, kerusuhan, demonstrasi anarkis, gerakan separatis serta berbagai tragedi lainnya yang menghiasi perjalanan negeri ini. Upaya dalam mengejar ketertinggalan bangsa bidang pendidikan dipandang perlu untuk memperbaharui kurikulum. Lahirlah kurikulum 2013, yang tidak terlepas dari kenyataan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih relatif rendah dibanding beberapa negara lain yang menjadi patok mutu (*benchmark*). Hasil penelitian yang dilakukan secara internasional menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke lima dari bawah, di atas Qatar, Kuwait, Maroko dan Afrika Utara, bidang kemampuan baca siswa tingkat Sekolah Dasar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di lingkungan ASEAN saja Indonesia tertinggal. PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*) yang mengkaji tentang PISA (*Programme for International Student Assessment*) melakukan penelitian secara berkala untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dalam *reading literacy*, *mathematics literacy*, dan *scientific literacy*, dalam ketiga hal tersebut Indonesia berada dalam kelompok bawah, demikian juga penelitian yang dilakukan TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) menunjukkan hal yang sama bahwa siswa Indonesia menduduki posisi bawah, bahkan secara relatif menunjukkan penurunan.²⁸

Kondisi ini jelas menimbulkan keprihatinan dan sekaligus dorongan untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu pemerintah melalui berbagai kebijakan, baik terkait dengan sarana prasarana, tenaga pendidikan, maupun kurikulum yang belakangan ini

²⁸McNeil & John D, *Contemporary Curriculum* (New York: John Willey & Son, 2006), h.1.

menjadi trend pendidikan persekolahan di Indonesia memperbaiki proses pendidikan dengan melahirkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbaiki proses pendidikan/pembelajaran pada jalur pendidikan formal atau sekolah serta memperhatikan kualitas dan spritual.

Bila ditilik berdasarkan pendekatan humanis melalui kurikulum 2013, jiwa generasi baru diharapkan makin nasionalis, *inklusif*, menghargai perbedaan, beretika dalam menyampaikan pendapat, serta mengamalkan berbagai karakter mulia lainnya. Kurikulum 2013 juga merupakan upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi analitis pelajar Indonesia dalam menyasiasi tuntutan abad XXI yang membutuhkan individu dengan kemampuan berpikir kompleks. Untuk itu, sistem pembelajaran yang berlangsung sekarang perlu dirubah sehingga memacu pelajar berpikir analitis, kompetitif, produktif, kreatif, inovatif dan afektif yang dijawab melalui kurikulum 2013 lewat pembelajaran tematik integratif. Untuk mencapai harapan para peserta didik, pendidik, serta semua komponen yang bertanggung jawab terhadap pendidikan.

Kurikulum 2013 merupakan salah satu reformasi kurikulum. Indonesia sudah mengalami pengembangan dalam kurikulum. Perubahan yang dimaksud baik dari pemahaman masyarakat Indonesia tentang kurikulum hingga aplikasinya dalam dunia pendidikan merupakan upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh mutu proses belajar mengajar. Mutu proses belajar mengajar ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu input peserta didik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan.

Sebagai salah satu komponen pendidikan, kurikulum sangat strategis digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dimaksudkan bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara guru dan

peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai nafas atau inti dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik dengan mengedepankan pendekatan humanis.

3. Karakteristik Kurikulum 2013

Di Indonesia perkembangan atau pengembangan kurikulum secara populer umumnya didasarkan pada dua hal yaitu substansi kurikulum seperti kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) serta kurun waktu di mana kurikulum ditetapkan seperti kurikulum 2013. Untuk kurikulum 2013 secara filosofisnya memang tidak beda dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mengacu pada paham *konstruktivisme* dengan pendekatan pembelajaran SCL (*Student Centered Learning*). Terlepas dari perubahan bidang dan materi pelajaran serta perubahan waktu, esensi kurikulum dalam aspek tujuan makro pendidikan serta aspek yang ingin diwujudkan dalam hasil belajar dan kompetensi lulusan tidak banyak berubah (hampir tidak berubah), hanya dalam pendekatan substantif ada pengembangan yaitu pendekatan *scientific*, yang sebenarnya sudah menjadi cara ilmiah yang umum dalam penalaran ilmiah. Secara umum penalaran ilmiah secara dikotomi ada dua yaitu induktif dan deduktif. Penalaran induktif berawal dari fakta bergerak ke generalisasi/teori. Penalaran deduktif berawal dari kaidah umum/generalisasi/teori untuk kemudian bergerak ke fakta/hal partikular.

Dalam kurikulum 2013 pendekatan humanis dimunculkan dalam berbagai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Pendekatan humanis yang dalam konteks penalaran dimulai dari hal-hal yang bersifat nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari kemudian bergerak ke hal-hal yang bersifat terapan dalam norma-norma kehidupan sehari-hari itu sendiri. Disimpulkan bahwa sudah tentu memerlukan kesiapan peserta didik dan pendidik dalam menjalankan alur pembelajaran. Humanis sebenarnya hanya mungkin kalau peserta didik sudah punya kemampuan berperilaku verbal dan siap untuk melakukannya.

Sebagai revisi kurikulum 2006, kurikulum 2013 lebih mengarah ke pembangunan karakter. Kurikulum baru ini yang telah diberlakukan pada tahun ajaran 2013-2014 mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai kepada jenjang pendidikan tinggi. Pelajaran peserta didik pada kurikulum baru 2013 ditekankan pada konten. Secara umum kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Adapun karakteristik kurikulum 2013 dipaparkan berikut:

- a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
- b. Madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
- c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat;
- d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
- f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
- g. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).²⁹

Adapun tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

²⁹Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Inti Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013* (Jakarta: Australian Aid Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia, 2014), h. 10.

bernegara, dan peradaban dunia.³⁰ Kurikulum 2013 ikut berperan penting dalam mengakui pentingnya pendidikan moral bangsa. Salah satu peran pentingnya adalah bahwa kurikulum 2013 ikut serta dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Hal ini membuktikan bahwa kurikulum 2013 ikut mengedepankan nilai-nilai kultural budaya berdasarkan nilai-nilai moral dan kaedah-kaedah yang berketuhanan Yang Maha Esa. Untuk lebih merinci betapa inkludinya kurikulum 2013 dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam berikut dipaparkan tentang perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

4. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia

a. Pendidikan Agama Islam Pada Masa Belanda

Ketika Van Den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831 M, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen sekolah dan agama dijadikan satu. Pada tahun 1883 M, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Priesterraden*. Atas nasehat dari badan inilah maka pada tahun 1905 M pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran (baca pengajian) harus minta izin lebih dahulu kepada pemerintah. Pada tahun 1925 M pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap Pendidikan Agama Islam bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pengajaran mengaji. Peraturan ini disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdlatun Wathan dan lain-lain.³¹

³⁰Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah* (Medan: Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, 2014), h. 5.

³¹Zuhairini *et.al.*, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), h. 148.

Gerakan organisasi pendidikan Islam yang berkembang tersebut merupakan langkah awal berkembangnya pula lembaga pendidikan Islam. Bila diklasifikasikan bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda pada awal dan pertengahan abad ke-20, adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren, yakni mengajarkan kitab-kitab klasik semata-mata.
- 2) Lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam, di lembaga ini di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama.
- 3) Lembaga pendidikan madrasah, lembaga ini mencoba mengadopsi sistem pesantren dan sekolah, dengan menampilkan sistem baru. Yaitu ada unsur-unsur yang diambil dari pesantren dan ada pula dari sekolah.³²

Jenis-jenis lembaga pendidikan pada zaman Belanda ini merupakan perkembangan pendidikan secara agamis. Lembaga pendidikan yang bergerak di lembaga pendidikan pesantren membuktikan bahwa Indonesia kuat akan nilai-nilai luhur bangsa.

b. Pendidikan Agama Islam Pada Masa Jepang

Tentang sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Masalahnya, Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama, yang penting bagi mereka adalah demi keperluan memenangkan perang, dan kalau perlu pemuka agama lebih diberikan keleluasan dalam mengembangkan pendidikannya. Berlainan dengan kolonial Belanda, di samping bertindak sebagai kaum penjajah, tetapi ada misi lain yang tidak kalah penting yang mereka emban yaitu misi agama Kristen, dan untuk ini tentu saja agama Islam yang menjadi mayoritas penduduk pribumi sekaligus sebagai penentang pertama kehadirannya, harus ditekan dengan berbagai cara, dan kalau perlu dilenyapkan sama sekali. Karena berseberangan dengan Belanda itulah

³²Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 36.

Jepang berusaha menarik simpati umat Islam dengan menempuh beberapa kebijaksanaan, di antaranya:

- 1) Kantor Urusan Agama yang ada pada zaman Belanda disebut *Kantoor Voor Inlandsche Zaken* yang dipimpin oleh orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Shumuka yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy'ari, dan di daerah-daerah juga disebut Sumuka.
- 2) Pondok pesantren yang besar-besar seringkali mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang.
- 3) Sekolah Negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
- 4) Di samping itu pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh KH. Zainal Arifin.
- 5) Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta.
- 6) Para ulama bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta).
- 7) Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.³³

Perkembangan pendidikan Islam masa Jepang bukan hanya satu bidang saja, melainkan seluruh yang mengikutsertakan kemajuan lembaga pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam masa Jepang mulai dari organisatoris keagamaan juga kekuatan pemuda Islam yang bersatupadu demi kemajuan dan kebesaran Islam di Indonesia.

c. Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Mulai Tahun 1945 Hingga Sekarang.

1). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 1954.

³³Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 1999), h. 23.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu dari tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk tercapainya cita-cita tersebut maka pemerintah dan rakyat Indonesia berusaha membangun dan mengembangkan pendidikan semaksimal mungkin, demikian halnya dengan pendidikan Islam. Sejak permulaan abad ke-20 telah muncul beberapa prakarsa pembaharuan pendidikan Islam. Pada waktu Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946, maka beberapa kegiatan yang berhubungan dengan agama yang sudah ada semenjak zaman kolonial dan penjajahan Jepang tetap dilanjutkan.³⁴

Segera setelah Departemen Agama didirikan, maka ikut mengembangkan kegiatan baru yakni keikutsertaan pemerintah dalam masalah agama. Pada permulaannya hanyalah bersifat administratif kemudian kegiatan berkembang memberikan dorongan positif terhadap penghayatan agama, terutama di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan agama semakin berkembang sesudah tahun 1946 ini, di mana adanya salah satu nota *Islamic Education in Indonesia* yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yang berisi sebagai berikut:

1. Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular.
2. Memberi pengetahuan umum di madrasah
3. Mengadakan Pendidikan Guru Agama dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).³⁵

Jenis sekolah yang ketiga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Departemen Agama itu sendiri. Jenis pertama dan kedua jelas dihubungkan dengan pendidikan Islam. Kebijakan Departemen Agama yang konsekwen dengan sistem sekolah yang diatur di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dimaksudkan supaya pendidikan agama yang sudah ada diperluas dan dikembangkan. Memang

³⁴Karel A. Stenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modren* (Jakarta:LP3ES,1994), h. 84.

³⁵*Ibid*, h. 87.

pada zaman kolonial sudah ada Undang-Undang yang memberikan kemungkinan pendidikan agama di sekolah umum. Sejumlah sekolah yang memakai sistem pendidikan Barat, diberikan sedikit sekali pelajaran agama.

Kebijaksanaan Departemen Agama sudah dilakukan kantor agama pada zaman Jepang. Selanjutnya peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan agama telah menunjukkan kemajuan tertentu. Pada tanggal 27 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) mengadakan pembicaraan mengenai pendidikan nasional. Hasil pembicaraan tersebut membentuk komisi khusus untuk merumuskan lebih rinci mengenai garis besar pendidikan di Indonesia dan tentang pendidikan agama ada beberapa usulan sebagai berikut:

1. Pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah.
2. Para guru dibayar oleh pemerintah.
3. Pada sekolah dasar pendidikan ini diberikan mulai kelas IV.
4. Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu.
5. Para guru diangkat oleh Departemen Agama
6. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum
7. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama.
8. Diadakan latihan bagi guru agama
9. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki
10. Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.³⁶

Perkembangan pendidikan agama di Indonesia semakin mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari beberapa keabsahan yang legal tentang keberadaan pendidikan agama pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 nomor 4 pada bab XII pasal 20 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 nomor 20 berbunyi:

³⁶ *Ibid.*, h. 91.

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.³⁷

Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak boleh mempengaruhi kenaikan kelas pada murid. Dalam sidang MPRS tahun 1960 ditetapkan juga bahwa pada universitas umum dimasukkan juga pendidikan agama dengan memberikan kebebasan bagi para mahasiswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti pengajaran agama.

Perkembangan pendidikan Islam selanjutnya pada masa orde baru dimulai dari kebijakan pada pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang memuat kebijakan tentang isi pendidikan. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah :

1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.³⁸

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu pendidikan harus dimiliki oleh rakyat sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Pada awal pemerintahan orde baru, pendekatan legal formal dijalankan tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni.

Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan

³⁷Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 nomor 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 nomor 20.

³⁸Pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966

Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Surat Keputusan Bersama (SKB) ini muncul dilatar belakangi bahwa setiap waganegara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah yang ingin melanjutkan, diperkenankan melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang setingkat di atasnya. Dan bagi siswa madrasah yang ingin pindah sekolah dapat pindah ke sekolah umum setingkat. Ketentuan ini berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada lingkungan pendidikan, diantaranya :

1. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat
4. Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.³⁹

Pada tahun 1984 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum

³⁹Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h. 3.

Madrasah. Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri tersebut dijiwai oleh Ketetapan MPR No.II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya Penyesuaian Sistem Pendidikan, sejalan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dengan melakukan perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara pelbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah.

Sehingga sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri tersebut lahirlah kurikulum 1984 untuk madrasah, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah, No. 100/1984 untuk Madrasah Tsanawiyah dan No. 101 Tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah.

Di antara rumusan kurikulum 1984 adalah memuat hal-hal strategis, diantaranya :

1. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler baik dalam program inti maupun program pilihan.
2. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya.
3. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program.⁴⁰

Selanjutnya dengan dilatarbelakangi akan kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam (ulama) di masa mendatang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional, maka dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Lebih lanjut dibentuklah Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama (MAPK) dengan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kekhususan MAPK ini adalah komposisi kurikulum 65 studi agama dan 35 pendidikan dasar umum. Sasarannya adalah penyiapan lulusan yang mampu menguasai ilmu-ilmu agama yang nantinya menjadi dasar lulusan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bidang keagamaan dan akhirnya menjadi calon

⁴⁰ *Ibid.*

ulama yang baik. Selanjutnya MAPK berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Namun lebih lanjut program ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga nasibnya sampai hari ini belum jelas keberadaannya. Harapan bangsa Indonesia bahwa Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) sangat dibutuhkan mengingat bangsa Indonesia perlu memproduksi peserta didik yang ahli di bidang ulama.

2). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 27 Maret 1989, memberikan perbedaan yang sangat mendasar bagi pendidikan agama. Pendidikan agama tidak lagi diberlakukan berbeda untuk negeri dan swasta, dan sebagai konsekuensinya diberlakukan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk operasional undang-undang tersebut, yaitu PP 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP 28/1990 tentang Pendidikan Dasar, PP. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, PP. No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (disempurkan dengan PP.22/1999). Semua itu mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga umum.

Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut telah memberi dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejak diberlakukan UU No. 2 Tahun 1989 tersebut lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian, kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan. Undang-Undang ini juga telah memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah luar biasa (SLB) yang berciri khas berdasarkan agama tertentu tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khasnya. Inilah poin

pendidikan yang kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, di mana para siswa dikhawatirkan akan pindah agama (berdasarkan agama yayasan/sekolah), karena mengalami pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Kritik itu semakin kencang, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah, No. 29/1990, yang secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 itu dan peraturan pemerintah tersebut dinilai oleh sebagian kalangan sebagai Undang-Undang yang tidak memberikan ruang dialog keagamaan di kalangan siswa. Ia juga memberikan peran tidak langsung kepada sekolah untuk mengkotak-kotakkan siswa berdasarkan agama.

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama juga ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT). Pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di sekolah menengah pertama (SMP) struktur kurikulumnya juga sama, di mana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan sekolah menengah atas (SMA), di mana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan Pendidikan Seni.

Dari sudut pendidikan agama, kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan Undang-Undang Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim orde baru menggulirkan gagasan

reformasi sekitar tahun 1998, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak.

3). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

Selanjutnya pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan adalah pasal 12 ayat 1 a. yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama." ⁴¹

Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3. Undang-Undang ini juga sekaligus mengubur bagian dari UU No. 2/1989 dan Peraturan Pemerintah, No. 29/1990, tentang tidak wajibnya sekolah dengan latar belakang agama tertentu (misalnya Islam) mengajarkan pendidikan agama yang dianut siswa (misalnya pelajaran agama Katolik untuk siswa yang beragama Katolik).

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 mewajibkan sekolah/yayasan Islam untuk mengajarkan pendidikan Katolik untuk siswa yang menganut agama Katolik. Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 inilah yang menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa `kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama.` Dalam penjelasan atas pasal 37 ayat 1 ini ditegaskan, `pendidikan agama

⁴¹Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Memahami Paradigma Baru*, h. 40.

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.⁴²

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum, juga diatur dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum dan komponen pendidikan lainnya. Ketua Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, (MP3A) Departemen Agama menambahkan, pelaksanaan pendidikan agama harus memperhatikan lima prinsip dasar, di antaranya: pertama, pelaksanaan pendidikan agama harus mengacu pada kurikulum pendidikan agama yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Kedua, pendidikan agama harus mampu mewujudkan keharmonisan, kerukunan dan rasa hormat internal agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. Ketiga, pendidikan agama harus mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.

Perjalanan kebijakan pendidikan Indonesia belum berakhir, pada tahun 2004 pemerintah menetapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kehadiran kurikulum berbasis kompetensi pada mulanya menumbuhkan harapan akan memberi keuntungan bagi peserta didik karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode cara belajar siswa aktif (CBSA). Namun dari sisi mental maupun kapasitas guru tampaknya sangat berat untuk memenuhi tuntutan ini. Pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual, ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakuan ujian nasional, sehingga kurikulum berbasis kompetensi (KBK) segera diganti dan disempurnakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) masih berlaku sampai sekarang.

⁴²*Ibid.* h.79

Pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah dalam rangka peningkatan akses dan mutunya, pada saat ini dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam.

5. Pendidikan Agama Islam Sebagai Mata Pelajaran

Undang-Undang pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang tampaknya masih terdapat dikotomi pendidikan. Di mana bila dicermati bahwa Undang-Undang Pendidikan Nasional masih membedakan antara pendidikan umum dan agama, padahal bila digabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum justru akan menciptakan kebersamaan dan juga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, serasi dan seimbang. Prioritas pendidikan Islam harus diarahkan pada empat hal, sebagai berikut:

- a. Pendidikan Islam bukanlah hanya untuk mewariskan paham atau pola keagamaan hasil internalisasi generasi terhadap anak didik.
- b. Pendidikan hendaknya menghindari kebiasaan menggunakan andai-andaian model yang diidealisir yang sering kali membuat kita terjebak dalam romantisme yang berlebihan.
- c. Bahan-bahan pengajaran agama hendaknya selalu dapat mengintegrasikan problematik empirik disekitarnya.
- d. Perlunya dikembangkan wawasan emansipatoris dalam proses mengajar agama.⁴³

Dilihat dari legalitas hukum penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, mengalami proses yang panjang yaitu sejak masa pasca kemerdekaan hingga ditetapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam proses mendapatkan legalitas hukum atas pelaksanaan pendidikan agama sejak kurun kemerdekaan, terjadi tarik menarik antara kelompok yang pro karena menganggap Pendidikan Agama Islam penting diberikan di sekolah/perguruan tinggi, dan mereka yang kontra karena menganggap tidak penting dan cukup diganti dengan pendidikan budi pekerti.

⁴³Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sejarah Pendidikan Islam*, h.4.

Semenjak awal kemerdekaan sampai masa orde baru, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah selalu masuk dalam agenda pembahasan atau atas dasar kemauan politik tokoh-tokoh nasional. Hal ini dikarenakan, setiap keputusan tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada dasarnya merupakan keputusan politik.

Pendidikan Agama Islam di sekolah umum pada dasarnya telah mendapat respon yang positif, dengan dikeluarkannya Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (UUSPN), di mana didalamnya diperkenalkan dua istilah, yaitu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah umum, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan keagamaan adalah lembaga pendidikan Islam atau satuan pendidikan Islam yang lazim dinamakan dengan perguruan agama. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelaksanaan pendidikan agama, sejak jaman pasca orde baru.

Selanjutnya dengan lahirnya Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 semakin mempertegas kedudukan pendidikan agama Islam sebagai salah satu elemen terciptanya tujuan pendidikan nasional secara umum. Sebagaimana pada Pasal 3:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi pesersta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴⁴

⁴⁴Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Memahami Paradigma Baru*, h. 37.

Perkembangan Pendidikan Agama Islam makin jelas dengan berlakukannya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan:

- a. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/PaketA,SMP/MTs/SMPLB/PaketB,SMA/MA/SMA LB/PaketC,SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan.atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.⁴⁵

Dukungan pemerintah lebih terencana lagi dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam, terlihat pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2004, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada bidang peningkatan kualitas kehidupan beragama, dan berlangsung sampai sekarang. Dalam arah kebijakannya dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda pembangunan nasional, disebutkan bahwa, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan. Hal ini disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam dijadikan sebagai mata pelajaran di setiap jenis dan jenjang pendidikan.

f. Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 Sebagai Mata Pelajaran Wajib

Kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah bahan-bahan pendidikan agama berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam. Kurikulum Pendidikan

⁴⁵PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Agama Islam merupakan alat untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam.⁴⁶

Dalam hal ini kurikulum Pendidikan Agama Islam menjadi penolong sekaligus pendorong dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam mengarahkan peserta didik untuk mengikuti setiap pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga tercapai nilai-nilai akademis yang mencerminkan nilai-nilai luhur sehingga mampu menjadikan peserta didik yang taat dan patuh dalam setiap norma dan agama. Pendidikan agama Islam akan membawa dan menghantarkan serta membina anak didik menjadi warga negara yang baik sekaligus umat yang taat beragama.⁴⁷

Pengembangan kurikulum 2013 menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Pencapaian perwujudan ditempuh melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan dijabarkan dalam kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian dari kurikulum 2013 memiliki peran penting berkenaan dengan pendidikan karakter. Pendidikan Agama Islam (PAI) menghimpun kompetensi pengetahuan, sistem nilai dan kompetensi keterampilan yang diaktualisasikan dalam sikap/watak Islami. Isi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 211 tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Dalam kurikulum 2013 terdapat pada pemakaian istilah kompetensi inti (KI) untuk menggantikan standar kompetensi (SK), tidak dipilah per aspek (alquran, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI) artinya Pendidikan Agama Islam (PAI) diajarkan sebagai satu kesatuan dan tidak dipilah persemester

⁴⁶Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), h. 30.

⁴⁷Hafni Ladjid, *Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), h. 26.

tetapi pertahun. Pelaksanaan evaluasi semester diserahkan kepada sekolah untuk mengaturnya. Setiap kelas terdiri dari empat kompetensi inti (KI) kemudian dijabarkan dalam kompetensi dasar (KD). Kompetensi inti 1 (KI 1) merupakan sikap spiritual, kompetensi inti 2 (KI 2) sikap sosial, kompetensi inti 3 (KI 3) kognitif dan kompetensi inti 4 (KI 4) adalah skill/keterampilan. Kompetensi inti 1 (KI 1) merupakan pengamalan *core* mata pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi inti 2 (KI 2) diamalkan dalam hubungannya dengan sesama manusia, Kompetensi inti 3 (KI 3) dan kompetensi inti 4 (KI 4) sudah jelas.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 sebagai mata pelajaran wajib adalah diembrio atas perkembangan program pendidikan Agama Islam. Di mana, sejak tahun 2005 dibentuk Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah, dan akhirnya disempurnakan menjadi Direktorat Pendidikan Agama Islam berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Saat ini perkembangan program/kegiatan bagi pendidikan Agama Islam sudah makin membaik dan terencana. Penetapan pendidikan agama itu sebagai mata pelajaran adalah dimuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 37 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

- 1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a) Pendidikan Agama;
 - b) Pendidikan kewarganegaraan;
 - c) bahasa;
 - d) matematika;
 - e) ilmu pengetahuan alam;
 - f) ilmu pengetahuan sosial;
 - g) seni dan budaya;
 - h) pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i) keterampilan/kejujuran; dan
 - j) muatan lokal.⁴⁸
- 2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

⁴⁸Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Memahami Paradigma Baru*, Pasal 37 ayat 1 h. 50.

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.⁴⁹

Dimuatnya pendidikan agama pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional membuktikan bangsa Indonesia sadar dan berupaya betapa pentingnya agama sebagai landasan moral dalam berkebangsaan dan berwarga negara. Pendidikan agama merupakan modal dasar yang perlu untuk dikembangkan guna melatih diri peserta didik sehingga mampu berkehidupan mandiri sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa. Pendidikan Agama Islam sebagai kurikulum di setiap jenis dan jenjang pendidikan membuktikan betapa pentingnya kekuatan keagamaan yang menciptakan suasana kedamaian dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.

1) Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di tiap jenjang madrasah

Tingkat satuan pendidikan di madrasah ada tiga tingkat yaitu: Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA). Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah terdiri atas:

- a) Alquran- Hadits, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menekankan pada kemampuan baca tulis alquran yang baik dan benar, memahami makna secara tektual dan kontekstual serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Akidah-Akhlak adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan/keimannnya serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai *al-Asma' al-Husna*. Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan menghayati diri akhlak terpuji (*mahmudah*) dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela (*mazmumah*) dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Fiqih adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menekankan pada yang benar mengenal ketentuan hukum

⁴⁹ *Ibid*, h.51.

dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan rukun ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari.

- d) Sejarah Kebudayaan Islam adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menekankan pada kemampuan mengambil ibrah/himah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain. Untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang.
- e) Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap Bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu alquran dan al-Hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. Untuk itu bahasa Arab di Madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu menyimak (*maharatu al-istima*), berbicara (*maharatu al-Kalam*), membaca (*maharatu al-qiraah*) dan menulis (*maharatu al-khitabah*).⁵⁰

Materi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah diberikan secara terpisah. Kurikulum madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah dilaksanakan berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional. Kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar isi, standar proses, dan standar penilaian Pendidikan Agama Islam. Kurikulum madrasah 2013 mata

⁵⁰ Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013*, h. 44.

pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan.⁵¹

Kurikulum Pendidikan Agama Islam di jenjang madrasah dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui kompetensi inti. Kurikulum Pendidikan Agama Islam diorganisir ke dalam berbagai mata pelajaran yang berfungsi sebagai sumber kompetensi. Mata pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi tersebut harus mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya ketentuan pada Pasal 37. Selain jenis mata pelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi, juga diperlukan beban belajar per minggu dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini kemudian didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan dapat dihasilkan oleh tiap mata pelajaran.

2) Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di tiap jenjang sekolah

Tingkat satuan pendidikan di sekolah ada tiga tingkat yaitu: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah digabung menjadi satu, dan porsinya hanya dua jam perminggu. Namun demikian di dalamnya pada dasarnya juga meliputi semua mata pelajaran pendidikan agama Islam yang ada di madrasah.⁵² Kurikulum sekolah dasar menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap,

⁵¹Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam* (lihat lampiran 1).

⁵²Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) h. 199-220.

keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan.

Pada jenjang sekolah pendidikan agama Islam itu adalah sebagai berikut:⁵³

a) Tingkat sekolah dasar

Materi yang diberikan adalah pelajaran adalah hanya menyangkut pokok-pokok ajaran Islam, misalnya masalah akidah (rukun iman), masalah syari'ah (rukun Islam).

b) Tingkat SMP dan SMA

Materi yang diberikan adalah materi yang mengandung nilai pemahaman, pengembangan, dan penerapan keyakinan keislaman.

Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah menyangkut dasar-dasar pokok ajaran Islam yang diharapkan mampu dipahami, dikembangkan dan diterapkan peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam. Guna mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam rangkaian kompetensi inti sangat penting diuraikan. Capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian.

Kompetensi inti, kompetensi dasar dikelompokkan menjadi empat sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu: 1). Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual (mendukung KI-1) atau kelompok 1, 2). Kelompok kompetensi dasar sikap sosial (mendukung KI-2) atau kelompok 2, 3). Kelompok kompetensi dasar pengetahuan (mendukung KI-3) atau kelompok 3, dan 4). Kelompok kompetensi dasar keterampilan (mendukung KI-4) atau kelompok 4.

⁵³Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 157.

Uraian kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan bermuara pada sikap. Melalui kompetensi inti, tiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selain itu juga memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari pembentukan sikap. Hal ini penting mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis karena pengetahuan masih selalu berkembang.

Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari kompetensi pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap (KI-1 dan KI-2) bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihapalkan, dan tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual sangat penting yang terkandung dalam materinya.

Dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung KI-1) dan individual-sosial (mendukung KI-2) dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (mendukung KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4).

Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan, dan berakhir pada pembentukan sikap. Dengan demikian, proses penyusunan maupun pemahamannya (dan bagaimana membacanya) dimulai dari kompetensi dasar kelompok 3. Hasil rumusan kompetensi dasar kelompok 3 dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar kelompok 4.

Hasil rumusan kompetensi dasar kelompok 3 dan 4 dipergunakan

untuk merumuskan kompetensi dasar kelompok 1 dan 2. Proses berkesinambungan ini untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke keterampilan dan bermuara ke sikap sehingga ada keterkaitan erat yang mendekati linier antara kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Di jenjang pendidikan madrasah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.⁵⁴

Untuk itu peserta didik harus mampu mencapai standar kompetensi lulusan dari suatu satuan pendidikan pada jenjang madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah.

B. Pendekatan Humanis

1. Paradigma Filosofik Pendekatan Humanis

Pendidikan humanis adalah sebuah pendekatan untuk pendidikan merupakan karya psikolog humanistik, Abraham Maslow and Carl Rogers.

Humanistic education (also called person-centered education) is an approach to education based on the work of humanistic psychologists, most notably Abraham Maslow and Carl Rogers. Carl Rogers has been called the "father of humanistic psychology" and devoted much of his efforts toward applying the results of his psychological research to person-centered teaching where empathy, caring about students, and genuineness on the part of the learning facilitator were found to be the key traits of the most effective teachers. ([Pendidikan humanis disebut juga pusat dari pendidikan dan merupakan dasar dari psikologi humanistik, Abraham Maslow dan Carl Rogers yang dianggap sebagai bapak psikologi humanistik dan banyak melakukan usaha dalam menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi itu sendiri untuk mengajar seseorang di mana pusat pembelajaran berada pada rasa

⁵⁴Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Memahami Paradigma Baru*, h. 78.

empati, kepedulian terhadap anak didik dan keaslian dari fasilitator pembelajaran merupakan ciri-ciri utama guru yang efektif)].⁵⁵

Disebutkan bahwa paradigma filosofik pendekatan humanis terfokus pada dasar-dasar psikologi. Dasar-dasar psikologi berawal dari rasa empati, di mana setiap manusia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Demikian halnya, dalam pembelajaran, pendidikan merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik sehingga pendidik memahami kebutuhan peserta didiknya. Berdasarkan rasa empati paradigma filosofik berdasarkan pendekatan humanis menimbulkan rasa peduli sehingga pembelajaran mempunyai makna tersendiri bagi masing-masing peserta didik.

Paradigma filosofik pendekatan humanis menjadikan pembelajaran sebagai wadah dalam mengembangkan kemampuan dan kepedulian. Setiap aktivitas dalam pembelajaran merupakan fasilitator dalam memahami setiap individu. Adanya saling memahami terhadap kebutuhan peserta didik maka pembelajaran pun berproses secara efektif. Pendidik mengetahui potensi dasar yang dimiliki peserta didik sehingga mudah untuk mengembangkan bakatnya. Potensi dasar peserta didik dapat dijadikan ajang pengembangan bakat sehingga pendidik berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru mengarahkan kemampuan peserta didik dengan pendekatan-pendekatan humanis baik dengan cara membangun interaksi yang harmonis antara peserta didik dan pendidik. Adanya saling kepedulian maka terjalinlah komunikasi yang utuh sehingga tercapai keterbukaan dan sikap demokrasi yang dipimpin.

Carl Rogers juga menyebutkan *humanistic of education focuses on education as symbolic action, as the foundation of discovery and, thus, as "equipment for living" in Kenneth Burke's terms. These essays will spark dialogue about improving education in democratic societies through the lens of humanism.* ([Pendidikan humanistik berfokus pada pendidikan

⁵⁵Clark. F. Power, *Moral Education* (New York: Greenwood Publishing Group: 1988) p. 218. ISBN 0313336474.

sebagai aksi simbolis, sebagai dasar penemuan dan dengan demikian akan memicu dialog tentang meningkatkan pendidikan di masyarakat demokratis melalui lensa humanisme)].⁵⁶

Pendidikan humanistik sebagai aksi simbolis menunjukkan bahwa peserta didik memiliki misi-misi khusus dalam mengembangkan potensi diri. Demikian halnya pendidik memahami atas aksi simbolis yang dimunculkan peserta didik sehingga peserta didik mampu meningkatkan keberhasilan pendidikannya dengan kondisi yang humanis.

Para ahli pendidikan humanis mengembangkan pendekatan kurikulum humanis. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi yaitu John Dewey. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada peserta didik. Di dalam kurikulum humanis, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. McNeil menyebutkan kurikulum atas pendekatan humanistik (*humanistic curriculum*), melihat kurikulum sebagai hal penting dalam membantu peserta didik menjadi apa yang mereka inginkan, kurikulum menekankan pada relevansi personal, perasaan, dan kesuksesan.⁵⁷

Adanya saling membantu antara peserta didik dan pendidik dengan sama-sama saling memahami maka perlu disusun suatu rancangan kurikulum yang tertulis. Kurikulum tersebut dimaksudkan sebagai bahan petunjuk dan pelaksanaan dalam mengembangkan materi ajar sesuai dengan potensi dasar peserta didik. Hal ini mengingat bahwa kurikulum mencakup tujuan dan isi bahan pelajaran dalam konsepsi/pendekatan tertentu dapat melaksanakan pembelajaran sehingga relevansi atau hubungan personal antara pendidik dan peserta didik terbangun. Untuk itu kurikulum dengan pendekatan humanis mampu mengembangkan konteks secara terkait sehingga cara melaksanakan pembelajaran dapat diwujudkan. Peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif.

⁵⁶Carl Roger, *Learning and Teaching Humanist* (New York: Commons License: Attribution Non-Commercial, 2015), h. 24.

⁵⁷McNeil & John D, *Contemporary Curriculum*, h.13.

2. Menghormati individu peserta didik.
3. Tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat.⁵⁸

Dalam pendekatan humanis ini, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Kurikulum melalui pendekatan humanis melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta di masa depan. Sesuai dengan prinsip yang dianut kurikulum sebagai pendekatan humanis menekankan integritas, yaitu kesatuan perilaku. Kurikulum bukan saja bersifat intelektual tetapi juga emosional dan tindakan. Beberapa acuan dalam kurikulum ini antara lain:

1. Integrasi semua domain afeksi peserta didik, yaitu emosi, sikap, nilai-nilai, dan domain kognisi, yaitu kemampuan dan pengetahuan.
2. Kesadaran dan kepentingan.
3. Respon terhadap ukuran tertentu, seperti kedalaman suatu keterampilan.⁵⁹

Karakteristik kurikulum model humanis berfungsi menyediakan pengalaman yang berharga bagi peserta didik dan membantu kelancaran perkembangan pribadi peserta didik. Hal tersebut menyebabkan perkembangan peserta didik berkembang dinamis searah dengan pertumbuhannya. Peserta didik mempunyai integritas dan otonomi kepribadian, dan sikap yang sehat terhadap diri sendiri. Jadi, kurikulum model humanis menjadikan manusia sebagai unsur sentral untuk menciptakan unsur kreativitas, spontanitas, kemandirian, kebebasan, aktivitas, pertumbuhan diri, termasuk keutuhan peserta didik sebagai keseluruhan, minat, dan motivasi intrinsik.⁶⁰

Disimpulkan dari sudut pandang/paradigma filosofik bahwa pendekatan humanis memberi peluang kepada guru dan peserta didik dalam membangun pembelajaran yang saling menguntungkan dalam rangka menciptakan pembelajaran yang mencapai titik kebersamaan.

⁵⁸Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum*, h.142.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 146.

Bersama dalam mencapai kegiatan inti dan bersama dalam menelaah materi melalui unsur kebermaknaan.

Humanisme dalam kajian paradigma/*filosofik pedagogis* menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran dipandang sebagai tindakan pribadi untuk memenuhi potensi peserta didik. Guru sebagai fasilitator, mempengaruhi humanis di mana berfokus pada kebebasan, martabat, dan potensi peserta didik. Peserta didik bertindak dengan niat dan nilai-nilai.

2. Strategi Pendekatan Humanis

Strategi yang digunakan untuk merancang pembelajaran sehingga peserta didik termaknai dalam setiap pembelajaran adalah dengan cara penggalan potensi diri. Pendekatan humanis memberikan strategi yang dianggap tepat dan relevan. Strategi pendekatan humanis dengan melakukan cara yakni menjadikan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat mendidik dan dididik (*homo educabile*)⁶¹

Pada dimensi ini manusia memiliki potensi yang menjadi objek dan subjek pengembangan diri. Pendidikan pun harus berpijak pada potensi yang dimiliki manusia, karena potensi manusia tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada rangsangan dari luar berupa pendidikan. Dalam realitasnya, manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, berpolitik, memiliki kebebasan memilih, sadar diri, memiliki norma, dan gemar bertanya tegasnya *bercivilization*.

Implikasi dari pemahaman tentang hakikat dan wujud manusia sebagai *homo educabile* pendidikan melakukan beberapa langkah yang dijadikan strategi melalui pendekatan humanis, yaitu: pertama, pendidikan lebih bersifat memberikan atau menyediakan stimulus agar secara otomatis peserta didik memberikan respons kepadanya; Kedua, pendidik tidak dapat memaksa kehendaknya kepada peserta didik, Ketiga, demokratisasi merupakan model pendidikan yang sangat relevan untuk mengembangkan potensi dasar manusia sekaligus membantu menanamkan sikap percaya

⁶¹Abdurrhman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif* (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 164.

diri dan tanggung jawab. Keempat, proses pendidikan harus selalu mengacu pada sifat-sifat ketuhanan atau tauhid (*teo-centris*). Dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam berarti pendidikan mengacu pada pendidikan keimanan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, mengingat Islam memuat doktrin tentang hak-hak manusia.

Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting terhadap hak azazi manusia dalam upaya mengedepankan nilai dan moral bangsa melalui penggalan potensi yang dimiliki peserta didiknya. Pendidikan Agama Islam sebagai upaya preventif dalam melakukan strategi kurikulum berdasarkan pendekatan humanis. Pendidikan Agama Islam menghargai hak setiap insan. Setiap manusia adalah makhluk alternatif dan juga makhluk eksploratif.⁶²

Manusia sebagai makhluk alternatif karena manusia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan menjalani kehidupannya. Kehidupan yang berada pada posisi keberkahan dan ridho Ilahi. Manusia sebagai ciptaan, dilengkapi dengan potensi agar dengan potensi itu dapat mengembangkan dirinya. Dengan demikian manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam adalah sebagai makhluk alternatif (dapat memilih), tetapi kepadanya ditawarkan pilihan nilai yang terbaik, yaitu nilai Ilahiyat. Di satu sisi manusia memiliki kebebasan untuk memilih arah, di lain pihak manusia diberi pedoman ke mana arah yang terbaik yang semestinya ia tuju. Manusia dapat dikategorikan sebagai makhluk bebas (alternatif) dan sekaligus terikat.

Makhluk eksploratif, disebabkan manusia memiliki potensi untuk berkembang dan dikembangkan. Manusia adalah makhluk sosial yang eksploratif karena manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri baik secara fisik maupun psikis. Manusia mempunyai sejumlah daya-daya yang dapat dikembangkan secara nyata. Dalam hal ini ada potensi dasar yang ada pada diri manusia tersebut yang dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Potensi dasar tersebut dapat berkembang

⁶²Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 105.

dengan membutuhkan bantuan dari luar dirinya. Bantuan yang dimaksud antara lain adalah dalam bentuk bimbingan serta pengarahan. Bimbingan dan pengarahan yang diberikan dalam membantu perkembangan tersebut pada hakekatnya diharapkan sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, yang sudah tersimpan sebagai potensi bawaannya. Karena itu bimbingan tidak searah dengan potensi yang dimiliki akan berdampak negatif bagi perkembangan manusia. Akan tetapi bimbingan yang se arah dan sesuai dengan kebutuhan dan penggalian potensi peserta didik maka dapat berkembang dengan sempurna.

Dalam hal ini potensi dasar pada diri manusia sebagai makhluk yang humanis dijadikan landasan dalam melaksanakan strategi pendekatan humanis itu sendiri. Perkembangan potensi manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan fisik. Sebagai makhluk hidup manusia memiliki sejumlah kebutuhan. Semua kebutuhan mengacu pada kepentingan pertumbuhan dan juga perkembangan manusia itu sendiri.

3. Mekanisme Pendekatan Humanis

Humanisme memandang bahwa perilaku itu mempunyai tujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik (niat, motif, tekad) dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Mekanisme pendekatan humanisme menjelaskan bahwa perilaku individu dalam konteks *what* (apa), *how* (bagaimana), dan *why* (mengapa). *What* (apa) menunjukkan kepada tujuan (*goals/incentives/purpose*) apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. *How* (bagaimana) menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan (*goals/incentives/purpose*), yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan *why* (mengapa) menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku (*how*), baik bersumber dari diri individu itu sendiri (motivasi instrinsk) maupun yang bersumber dari luar individu (motivasi ekstrinsik).

Perilaku individu diawali dari adanya kebutuhan. Setiap individu, demi mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidupnya,

akan merasakan adanya kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam dirinya. Dalam hal ini, Maslow mengungkapkan jenis-jenis kebutuhan-individu secara hierarkis, yaitu:

- a. kebutuhan fisiologikal, seperti: sandang, pangan dan papan
- b. kebutuhan keamanan, tidak dalam arti fisik, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual
- c. kebutuhan kasih sayang atau penerimaan
- d. kebutuhan *prestise* atau harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status
- e. kebutuhan aktualisasi diri.⁶³

Sementara itu, Stranger dalam Nana Syaodih Sukmadinata menentangahkan empat jenis kebutuhan individu, yaitu:

- a. Kebutuhan berprestasi (*need for achievement*), yaitu kebutuhan untuk berkompetisi, baik dengan dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai prestasi yang tertinggi.
- b. Kebutuhan berkuasa (*need for power*), yaitu kebutuhan untuk mencari dan memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain.
- c. Kebutuhan untuk membentuk ikatan (*need for affiliation*), yaitu kebutuhan untuk mengikat diri dalam kelompok, membentuk keluarga, organisasi ataupun persahabatan.
- d. Kebutuhan takut akan kegagalan (*need for fear of failure*), yaitu kebutuhan untuk menghindar diri dari kegagalan atau sesuatu yang menghambat perkembangannya.⁶⁴

Kebutuhan-kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi dorongan (motivasi) yang merupakan kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat *persistensi* dan *antusiasmenya* dalam melaksanakan suatu aktivitas, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik).

Jika kebutuhan yang serupa muncul kembali maka pola mekanisme perilaku itu akan dilakukan pengulangan (*stereotype behavior*), sehingga membentuk suatu siklus. Berkaitan dengan motif individu, untuk

⁶³Stephen P. Robin, *Organizational Behaviour Perilaku Organisasi Konsep, Kontroversi, Aplikasi* alih bahasa Hadyana Pujaatmaka (Jakarta: Prenhallindo,1996), h. 47.

⁶⁴Nana Syaodih Sukmadinata. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2005), h.11 .

keperluan studi psikologis, motif individu dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu :

- a. Motif primer (*basic motive dan emergency motive*); menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, dikenal dengan istilah *drive*, seperti: dorongan untuk makan, minum, melarikan diri, menyerang, menyelamatkan diri dan sejenisnya.
- b. Motif sekunder; menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari, seperti: takut yang dipelajari, motif-motif sosial (ingin diterima, konformitas dan sebagainya), motif-motif obyektif dan *interest (eksplorasi, manipulasi, minat)*, maksud dan aspirasi serta motif berprestasi.

Untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari indikator-indikatornya, yaitu: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) *persistensi* pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan; (5) *devosi* dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan.

Dalam pandangan humanis, disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam diri peserta didik, setiap aktivitas yang dilakukan individu akan mengarah pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, terdapat dua kemungkinan, tercapai atau tidak tercapai tujuan tersebut. Jika tercapai tentunya individu merasa puas dan memperoleh keseimbangan diri (*homeostatis*). Namun sebaliknya, jika tujuan tersebut tidak tercapai dan kebutuhannya tidak terpenuhi maka dia akan kecewa atau dalam psikologi disebut frustrasi. Reaksi individu terhadap frustrasi akan beragam bentuk perilakunya, bergantung kepada akal sehatnya (*reasoning*, inteligensi). Jika akal sehatnya berani menghadapi kenyataan maka dia akan lebih dapat menyesuaikan diri secara sehat dan rasional (*well adjustment*). Namun, jika akal sehatnya tidak berfungsi sebagaimana

mestinya, perilakunya lebih dikendalikan oleh sifat emosionalnya, maka dia akan mengalami penyesuaian diri yang keliru (*maladjustment*).

Bentuk perilaku salah (*maldjustment*), diantaranya: (1) *agresi* marah; (2) kecemasan tak berdaya; (3) *regresi* (kemunduran perilaku); (4) fiksasi (perasaan terikat atau terpusat pada sesuatu secara berlebihan); (5) *represi* (menekan perasaan); (6) rasionalisasi (mencari alasan); (7) *proyeksi* (melemparkan kesalahan kepada lingkungan); (8) *sublimasi* (menyalurkan hasrat dorongan pada obyek yang sejenis); (9) kompensasi (menutupi kegagalan atau kelemahan dengan sukses di bidang lain); (10) berfantasi (dalam angan-angannya, seakan-akan ia dapat mencapai tujuan yang didambakannya).

Di sinilah peran guru untuk sedapat mungkin membantu para peserta didiknya agar terhindar dari konflik yang berkepanjangan dan rasa frustrasi yang dapat menimbulkan perilaku. Sekaligus juga dapat memberikan bimbingan dan mekanisme yang tepat melalui pendekatan humanis untuk mengatasinya apabila peserta didik mengalami konflik yang berkepanjangan dan frustrasi.

4. Kegiatan Evaluasi Pendekatan Humanis

Proses pemanusiaan atau humanisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung membutuhkan tentang penjelasan hakikat manusia yang dijadikan landasan pedagogik transformatif. Dalam upaya mencari konsep manusia dengan berbagai paradigma yang berbeda melalui strategi dan mekanisme pendekatan humanis melampaui langkah terakhir yaitu kegiatan evaluasi. Evaluasi berupaya untuk mencari solusi pemecahan tentang kesulitan atau masalah yang sedang dihadapinya. Menyadari sekaligus memahami suatu kesulitan yang sedang dialami diri sendiri tentu sangatlah penting. Sikap semacam itu tidak hanya berfungsi untuk manajemen diri, melainkan juga sebuah upaya dalam melihat sisi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing individu, atau siapa saja yang sedang dalam proses belajar.

Evaluasi dapat dilakukan dengan membuat standar evaluasi yang hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran/pelatihan. Evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta pelatihan itu sendiri (*self evaluation*); sehingga memunculkan adanya perubahan positif perilaku dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan.

Pelaksanaan evaluasi berdasarkan pendekatan humanis dilakukan dengan menyusun terlebih dahulu ruang lingkup materi evaluasi ditetapkan bersama secara partisipatif atau berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait yang terlibat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Evaluasi ditujukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembelajaran serta materi yang diberikan sesuai dengan perubahan sikap dan perilaku.

Dengan demikian proses pendidikan yang berlangsung merupakan perpaduan yang menyeluruh dari dinamika manusia dari partisipasinya dalam kehidupan mengembangkan potensi dirinya. Sebagaimana yang disebutkan Tilaar bahwa pendidikan dapat mengembangkan potensi-potensi yang tak terbatas di dalam pembentukan watak dan mengangkat derajat manusia.⁶⁵

Dianalisis bahwa sesungguhnya hanya manusialah sebagai makhluk ciptaan tertinggi, yang mempunyai kemampuan-kemampuan. Manusia dilahirkan sama, tanpa mendiskriminasikan berdasarkan ras dan kelahirannya. Sekalipun ada pengevaluasian yang akhirnya adanya keberhasilan dan kegagalan namun manusia tetap mengembangkan kemampuan diri yang tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tua, sekolah dan masyarakat. Manusia bebas bergerak dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tata aturan nilai-nilai pendidikan. Manusia berdaya guna dan berhasil guna bila setiap potensi yang ada pada dirinya diintrofeksi dan diperbaiki.

⁶⁵H.A.R.Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 187.

5. Pengembangan Pendidikan Dari Aspek Kurikulum Berdasarkan Pendekatan Humanis

Pendekatan humanis bertujuan mengembangkan jiwa dan semangat belajar. Berdasarkan teori dan prakteknya bahwa pendekatan humanis mampu menciptakan rasa demokrasi dan kebersamaan di antara peserta didik dan pendidik. Pendekatan humanis menjadikan setiap orang memiliki rasa terbuka dengan sesama sehingga membangun budaya yang saling membutuhkan dan tidak adanya perbedaan. Pendekatan humanis menciptakan komitmen kemanusiaan yang tinggi di antara peserta didik sehingga memunculkan jiwa dan semangat serta kebebasan dalam berintelektual, pengembangan moral sesuai dengan dasar-dasar filosofis bangsa. Untuk menciptakan kebersamaan dan kebebasan dalam berintelektual sebagai bagian dari pendekatan humanis, maka melalui pendidikan pendekatan humanis dapat dikembangkan sebagaimana yang ditawarkan Rosseau dan Pestalozzi dalam Research Journal (EIIRJ) Bi-monthly Reviewed Journal July/Aug 2013 y:

Humanism was developed as an educational philosophy by Rousseau (1712-1778) and Pestalozzi, who emphasized nature and the basic goodness of humans, understanding through the senses, and education as a gradual and unhurried process in which the development of human character and pluralistic democracy. Humanis telah dikembangkan dalam dunia pendidikan oleh Rousseau (1712-1778) dan Pestalozzi, di mana disebutkan secara natural bahwa dasar-dasar dari humanis itu adalah kepercayaan yang tinggi, pemahaman pemikiran dan perasaan dan pendidikan itu sendiri dijadikan sebagai proses yang besar yang mampu mengembangkan watak kemanusiaan dan keberagaman demokrasi.⁶⁶

Dalam hal ini disebutkan bahwa pengembangan pendidikan dari aspek kurikulum berdasarkan pendekatan humanis dapat dilakukan melalui kepercayaan yang tinggi. Dalam dunia pendidikan kepercayaan yang tinggi dimaknakan dibentuknya atau dibangunnya sebuah wadah

⁶⁶Research Journal (EIIRJ) Bi-monthly Reviewed Journal July/Aug 2013 y. *Developmental Humanism*, h.31.

pendidikan yang saling berbuat satu sama lain antara peserta didik dan pendidik. Peserta didik mampu mengaktualisasikan segenap potensi dirinya guna mengembangkannya sehingga mampu menjadi pemimpin dirinya sendiri. Dengan demikian rasa kepercayaan yang tinggi muncul dan berkembang. Pengembangan pendekatan humanis dapat juga dilakukan dengan cara menciptakan kebersamaan dalam menjalankan kehidupan. Kebersamaan dalam menjalankan kehidupan dalam dunia pendidikan dimaksudkan dilakukan dengan pendekatan saling membutuhkan dan memiliki serta berupaya saling mencapai keberhasilan.

Pengembangan pendekatan humanis ini berakar dari hal yang dirasakan bersama dan ditemukan dalam cara berfikir yang mengarah kepada kehidupan keberagaman. Pengembangan pendidikan dari aspek kurikulum berdasarkan pendekatan humanis mampu menciptakan kekuatan akan kepercayaan yang mendasar sehingga pendidik memahami kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik yang memiliki kebebasan bertindak, pengembangan moral, kemampuan berfikir, perasaan berestetika dan perasaan beragama. Peserta didik mampu menciptakan pembelajaran yang memberikan kekuatan sebagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Pendekatan humanis menjadikan peserta didik mengontrol setiap hal-hal yang hendak dicapai dalam tujuan pendidikan. Pengembangan pendidikan dari aspek kurikulum melalui pendekatan humanis, di mana kurikulum bertujuan menciptakan semangat belajar yang tinggi, kebebasan berbuat peserta didik serta melahirkan tanggung jawab yang luhur. Pengembangan pendekatan humanis peserta didik adalah dorongan tersendiri untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi.

Peserta didik terdorong untuk melakukan kondisi-kondisi instrinsik yang bersifat kemanusiaan melalui pendekatan humanis. Adapun cara yang dilakukan peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan adalah berpedoman kepada pendekatan-pendekatan humanis. Peserta didik

menjadikan kurikulum sebagai rujukan, kompas serta acuan dalam mengembangkan sikap, *knowledge* dan *ekploratif*.

6. Bentuk-Bentuk Pendekatan Humanis

Bentuk-bentuk pendekatan humanis diklasifikasikan kepada empat pendekatan sebagai berikut:

The forms of humanistic education theoretically, humanistic education can be classified into four distinct forms or approaches; 1. classical humanistic education; 2. romantic humanistic education, 3. existentialist humanistic education, radical humanistic education. ([Bentuk-bentuk dari teori pendidikan berdasarkan pendekatan humanis dikelompokkan kepada empat bentuk atau empat pendekatan: 1. pendidikan humanis secara klasikal, 2. pendekatan pendidikan berdasarkan kemanusiaan yang bersifat romantis, 3. keberadaan pendidikan humanis dan pendidikan kemanusiaan secara mendasar.])⁶⁷

Pengklasifikasian bentuk-bentuk ataupun pendekatan pendidikan berdasarkan pendekatan humanis berawal dari pengelompokan pendekatan itu sendiri secara klasikal sehingga diharapkan adanya hubungan yang romantis dari kondisi ataupun keberadaan pendekatan itu sendiri dan diupayakan secara maksimal ataupun secara mendasar mampu melakukan hal-hal yang bersifat mencapai kepada kebutuhan peserta didik. Berikut uraian dari bentuk pendekatan humanis pendidikan.⁶⁸

- a. *Classical humanistic education*, klasikal dimaksudkan bahwa adanya hubungan yang ideal antara pendapat seseorang yang dijadikan sebagai model dan objek dalam menciptakan pendidikan kemanusiaan dari perspektif humanis itu sendiri. Pendidikan kemanusiaan dimaksudkan adanya bentuk studi yang khusus dijadikan sebagai pendidikan yang bersifat normatif sehingga kebebasan peserta didik untuk menciptakan

⁶⁷Craig Kallendorf, "Humanism." *In A Companion to the Philosophy of Education*, edited by Randall Curren (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003), h.62-72.

⁶⁸Ravi Singh, *Philosophy And Implications Of Humanistic Education* (Dehradun: Sainath University:2013), h. 28.

karakter diri dapat dicapai. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan dalam menyikapi bentuk klasikal pendekatan pendidikan humanis ini peserta didik dijadikan sebagai bagian-bagian dari kehidupan kemanusiaan. Kehidupan kemanusiaan menjadikan pendidikan sebagai dunia kerja yang besar dengan berbagai tradisi. Pendekatan pendidikan humanis secara klasikal termasuk kepada: menciptakan rasa *egalitarianisme* yang tinggi, dan mampu untuk berkritik serta bebas memberikan pendapat. Di dalam pendekatan pendidikan humanis secara klasikal pembelajaran bersifat praktik. Di mana peserta didik mampu mengembangkan diri hingga menjadi manusia yang mapan dan berguna bagi sesamanya.

- b. *Romantic humanistic education*, bentuk pendekatan humanis yang kedua adalah kemanusiaan yang romantis, artinya pendidikan itu diciptakan dengan suasana yang penuh dengan rasa romantis yaitu adanya suasana yang alami serta penuh dengan pendekatan-pendekatan terafi. Pendekatan humanis bersifat romantis ini diharapkan menciptakan budaya yang tinggi, pengetahuan yang beragam, kebebasan dalam memperoleh pendidikan dan memiliki status sosial yang bermasyarakat. Pendekatan humanis dengan bentuk romantis melahirkan kehidupan yang bermakna, menyeluruh dan berintegrasi antara perasaan dan kenyataan sehingga mampu memahami perasaan setiap individu untuk menjadikan hubungan yang lebih baik. Hubungan yang baik ini lahir dari suasana pembelajaran yang alami dan melahirkan generasi-generasi peserta didik yang mampu menguasai pengetahuan secara teori dan praktek. Pendekatan humanis berdasarkan sikap romantis dapat menciptakan kehidupan yang bersifat kekeluargaan dengan memiliki rasa kepedulian, pengembangan dan aktualisasi diri. Pengalaman, hubungan yang harmonis, sifat demokrasi yang tinggi serta pengembangan pendidikan yang menyeluruh merupakan kondisi pendekatan humanis bersifat romantis juga. Bentuk pendekatan humanis yang bersifat romantis dikategorikan bahwa

pendidikan sangat mendasar untuk selalu eksis setiap saat. Bentuk pendekatan humanis bersifat romantis dibangun dengan kondisi dan eksistensi rasa kemanusiaan yang tinggi.

- c. *Existentialist humanistic education*, bentuk dari pendekatan pendidikan humanis yang ketiga adalah keberadaan dari pendidikan humanis itu sendiri. Keberadaan pendekatan pendidikan humanis didasarkan kepada makna filosofis. Keberadaan pendidik menunjukkan adanya hubungan yang bersifat humanis. Hubungan yang bersifat humanis ini menciptakan kondisi romantis dan alami setiap saat sehingga melahirkan kebaikan dan kekhususan yang mendasar. Keberadaan pendekatan pendidikan humanis ini melahirkan kebebasan dalam melahirkan nilai-nilai kemanusiaan yang bijak. Kebijakan yang bersifat eksternal, natural ataupun supernatural dan mampu mencapai kreativitas yang kreatif dan bertanggung jawab sehingga menjadikan peserta didik yang memiliki identitas tersendiri. Keberadaan dari pendekatan humanis ini menunjukkan kehidupan bermaknaan. Bermakna dalam kebebasan dan tanggung jawab yang menciptakan falsafah hidup dan wawasan moral yang luhur. Pendidik dalam lingkungan pendekatan humanis mampu merealisasikan diri dengan berbagai cara seperti berkreasi dalam pembelajaran, bertanggung jawab dalam aktivitas, bernilai dan bermakna dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dan nyata.
- d. *Radical humanistic education*, bentuk keempat dari pendekatan pendidikan humanis adalah mengidentifikasi hal-hal yang bersifat khusus dengan pendekatan pendidikan yang mendasar sehingga kondisi dan keadaan pendidikan terpenuhi. Bentuk ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam melakukan isu-isu pendidikan sangat berpeluang dalam menciptakan budaya, sosial, ekonomi yang berpengaruh dalam kondisi emosional, intelektual, dan pengembangan moral. Berdasarkan kenyataan pengaruh tersebut melahirkan budaya peserta didik yang mayoritas dalam lingkungan budaya pendidikan itu

sendiri. Budaya pendidikan dapat dijadikan sebagai cara dalam berbuat dan bertindak. Budaya pendidikan ini dimaksudkan berimplikasi kepada pertukaran sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dimaksud mencakup kebijakan pendidikan, praktek langsung pendidikan dengan kekuatan bangsa berdasarkan gender, kebijakan sosial, kekuatan, dan tanggung jawab. Dalam hal ini pendidik dituntut juga untuk beremansipasi dan mempunyai *power* kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat berbuat maju dan kritis terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Pendidik juga mampu bertransformasi sehingga mempunyai kekuatan dalam menciptakan sekolah yang bersifat publik, sekolah yang memiliki intelektual yang tinggi. Dengan demikian semua peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, usia, latar belakang dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dalam rangka menjadikan sekolah yang publik dan berinteligensi. Potensi dan tanggung jawab peserta didik dalam pendekatan pendidikan humanis ini diharapkan bersifat hidup dalam eksistensi kehidupan bermasyarakat yang utuh.

Keempat bentuk pendekatan pendidikan humanis ini merupakan program pendidikan yang bersifat *subject-matter for education*. Hal ini dimaksudkan keempat bentuk pendekatan ini lebih cenderung kepada manifestasi mata pelajaran secara terpisah. Manifestasi mata pelajaran menunjukkan kepada kehidupan yang bersifat memimpin dan memberi bimbingan kepada peserta didik. Pendidik humanis dapat mengembangkan keempat bentuk ini ke arah hubungan peserta didik yang bersifat saling berinteraksi sesama peserta didik. Budaya interaksi peserta didik diwujudkan dengan pembelajaran yang bersifat luas. Kebermaknaan pengetahuan dan tanggung jawab kebudayaan merupakan hal yang mendasar dilakukan untuk menciptakan suasana kehidupan yang ideal dan hubungan yang baik antara komitmen dan budaya yang baik.

Disimpulkan bahwa keempat bentuk pendekatan pendidikan humanis ini berupaya untuk mencapai watak pendidik yang bertanggung

jawab untuk menciptakan peserta didik yang hidup dalam kehidupan yang baik. Keempat bentuk pendekatan pendidikan humanis ini sangat bagus dalam menciptakan suasana sekolah yang memiliki atmosfer kepedulian, kepercayaan, dorongan, keterbukaan, kehormatan, rasa keadilan, toleransi, kebebasan, komitmen, tanggung jawab dan pertukaran hak. Tanpa dasar-dasar tersebut teori pendekatan pendidikan humanis tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan pendidik dan peserta didik.

7. Pendekatan Humanis Sebagai Filosofi Pendidikan

Salah satu yang termasuk kepada pendekatan humanis dalam mengembangkan kurikulum adalah mempertinggi harkat manusia, dan ini merupakan dasar filosofis manusia. Manusia adalah subjek pendidikan yang mengikuti seluruh aktivitas kehidupan. Berarti harkat manusia itu sendiri merupakan filosofi dari pendidikan itu juga. Banyak hal yang termasuk dalam lapangan kehidupan antara lain pelaksanaan pendekatan humanis dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik sebagai dasar filosofis. Humanis adalah populasi yang bersifat multikultural yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bervariasi dan masing-masing mempunyai kebermaknaan tersendiri.⁶⁹

Pendekatan humanis sebagai filosofi pendidikan berawal dari potensi dasar peserta didik hingga mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah yang mencerminkan nilai-nilai diri sehingga memiliki komitmen yang kuat. Dalam hal ini pendidik harus percaya bahwa dalam filosofi pendidikan pendekatan humanis merupakan nilai-nilai kehidupan yang menjadikan peserta didik memiliki kesempatan untuk merubah sikap kepada yang lebih baik. Peserta didik dapat berkreasi dan menjadikan pendekatan humanis sebagai lingkungan pembelajaran yang murni. Murni sesuai dengan keinginan dan kebutuhan serta mampu meningkatkan kesadaran masing-masing diri siswa. Sebagai subjek didik, peserta didik diarahkan secara langsung oleh pendidik untuk memperoleh pelayanan

⁶⁹Markku Peltonen, *Classical Humanism and Republicanism in English Political Thought* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), h. 1570- 1640.

pendidikan dan fasilitas bimbingan belajar yang bersifat mendidik. Pendidik harus berupaya secara maksimal dalam mengembangkan kepribadian peserta didik dan memberikan dorongan bagi peserta didik untuk menjadi manusia yang berguna. Sekolah sebagai lingkungan pembelajaran yang di dalamnya tercipta kepedulian. Pendidik dapat melakukan berbagai cara antara lain mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang mampu beraktualisasi sendiri. Adapun yang dapat dilakukan pendidik dalam menciptakan aktualisasi diri peserta didik adalah mengembangkan talenta/bakat, potensi, kapasitas dan lain sebagainya.

Kurikulum dengan bantuan pendekatan humanis dapat berpeluang menjadikan peserta didik memiliki pengalaman dan senantiasa mampu mengembangkan pengetahuan. *Humanist nursing curriculums should provide opportunities for the student to learn through a multitude of experiences and reflect upon them thoroughly, resulting in the development of self knowledge.* ([Kurikulum dengan bantuan humanis menciptakan pembelajaran yang nyata dan maksimal mengembangkan potensi peserta didik secara baik dapat dijadikan sebagai harapan-harapan peserta didik dalam pembelajaran di mana peserta didik mampu berfikir dan berpengalaman dan merefleksikan pengalaman tersebut dalam mengembangkan pengetahuan sendiri)].⁷⁰

Dalam hal ini tujuan dari pendekatan humanis sebagai filosofi pendidikan adalah mendidik dan menstimulasi perkembangan kognitif siswa dalam lingkungan yang mendukung untuk tercapainya perkembangan yang baik. Di mana pendidikan itu adalah nyata sesuai dengan kehidupan yang *emperik*. Dalam pendekatan humanis subjek dan keberadaan pendidikan itu jelas dan mempunyai akar yang berada dalam kebermaknaan setiap individu sehingga menemukan kehidupan yang bermakna pula.

⁷⁰Bruce A Kimball, *Orators and Philosophers: A History of the Idea of Liberal Education* (New York and London: Teachers College, Columbia University, 2009), h. 111.

Kenyataannya, pendekatan humanis didasarkan kepada perasaan dan pengalaman setiap manusia. Maksudnya pendekatan pendidikan humanis mengakui bahwa setiap pengalaman seseorang merupakan kehidupan yang nyata. Seseorang bermakna jika berhubungan dengan kenyataan kehidupan yang lain pula. Kehidupan yang lain itu seperti kebebasan dalam bertukar pikiran. Hal ini menunjukkan seseorang mampu memimpin dirinya sehingga menciptakan konsep-konsep yang nyata dalam kehidupannya. Kleimen menyebutkan bahwa *knowledge in the humanistic philosophy is gained through experiences which, "illuminate the values and meanings central to each person's life world."* ([Pengetahuan dalam pendekatan humanis secara filosofis adalah membimbing pengalaman-pengalaman berfikir tersebut hingga menciptakan kehidupan yang bernilai dan bermakna)].⁷¹

Adapun cara yang dapat direfleksikan oleh peserta didik adalah menemukan kepercayaan diri yang baik dan bernilai. Di dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa: *humanists do not engage in quantitative studies but rather they want to explore the lived experience of humans taking a phenomenological approach to research and gaining knowledge* ([Humanis tidak dapat dilakukan secara kuantitatif oleh peserta didik tetapi lebih baik dilakukan peserta didik yang ingin melakukan petualangan dalam pengalaman kehidupan sehingga mewujudkan pendekatan kemanusiaan yang bersifat pendekatan fenomenologi kepada penelitian dan bimbingan pengetahuan)].⁷²

Pengetahuan dalam pendekatan humanis secara filosofis adalah membimbing pengalaman guna melakukan dua buah kegiatan sekaligus yaitu proses pengembangan kognitif dan afektif. *Knowledge in the humanistic philosophy is gained by experience using both cognitive and*

⁷¹Gary Remer, *Humanism and the Rhetoric of Toleration* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007), h. 210.

⁷²M. Traynor, *Humanism and its critiques in nursing research literature Journal of Advanced Nursing Electronic International Interdisciplinary Research Journal (EIJRJ)* July/Aug 2013, h. 41.

affective processes. ([pengetahuan dalam filosofi humanistik didapatkan dari pengalaman yang menggunakan proses kognitif dan afektif]).⁷³

Dalam hal ini pendekatan humanis secara filosofis dijadikan sebagai subjek. Pendekatan humanis merupakan suatu keberuntungan yang menunjukkan adanya pengembangan perbedaan profesi. Secara aksiologi komponen-komponen filosofis humanis adalah pedoman dan penghormatan. Pendekatan humanis mengilhami lahirnya nilai dan tanggung jawab dari setiap individu sehingga tercipta manusia yang bertanggung jawab. Model pendidikan humanis merupakan cara yang digunakan pendidik dalam tingkatan-tingkatan kreativitas peserta didik. Pendidik dapat melakukannya dengan cara mengembangkan proses latihan antara ilmu dan teknik-teknik yang dimiliki peserta didik. Peserta didik mampu merefleksikan setiap pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai kehidupan pribadi yang bermakna. Cara-cara yang dilakukan peserta didik tersebut diharapkan mampu mengembangkan tingkah laku sehingga memiliki karakteristik tersendiri dalam diri peserta didik.

8. Prinsip-Prinsip Pendidikan Dalam Pengembangan Kurikulum Berdasarkan Pendekatan Humanis

Ada lima dasar yang dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip pendidikan dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan pendekatan humanis, yaitu:

Students should be able to choose what they want to learn. Humanistic teachers believe that students will be motivated to learn a subject if it's something they need and want to know. 2) The goal of education should be to foster students' desire to learn and teach them how to learn. Students should be self-motivated in their studies and desire to learn on their own. 3) Humanistic educators believe that grades are irrelevant and that only self-evaluation is meaningful. Grading encourages students to work for a grade and not for personal satisfaction. In addition, humanistic educators are opposed to objective tests because they test a student's ability to memorize and do not provide sufficient educational feedback to the teacher and student. 4) Humanistic educators believe that both

⁷³McCarthy & George E, *Classical Horizons: The Origins of Sociology in Ancient Greece* (Albany: Suny Press, 2003), h. 6.

feelings and knowledge are important to the learning process. Unlike traditional educators, humanistic teachers do not separate the cognitive and affective domains. 5) Humanistic educators insist that schools need to provide students a comfortable environment so that they will feel secure to learn. Once students feel secure, learning becomes easier and more meaningful. ([1. Siswa seharusnya dapat memilih mata pelajaran yang mereka ingin pelajari. Guru-guru humanis yakin bahwa para pelajar akan semangat untuk mempelajari pelajaran yang mereka butuhkan dan pelajaran yang ingin mereka ketahui. 2. Tujuan pendidikan seharusnya mendorong minat siswa untuk belajar, siswa termotivasi dalam belajar dan belajar dengan kesadaran mereka sendiri. 3. Para pendidik yang berpaham humanis menyakini bahwa peringkat tidak berguna dan hanya evaluasi diri yang lebih baik. Peringkat hanya akan membuat siswa belajar untuk mengejar peringkat bukan untuk kebutuhan/kepuasan dirinya. Lagi pula para pendidik yang berpaham humanis tidak setuju dengan sistem objektif test karena sistem tersebut hanya menilai kemampuan mengingat siswa saja, tidak menghasilkan umpan balik yang memadai bagi guru dan siswa 4. Para pendidik yang berpaham humanis percaya bahwa perasaan dan ilmu merupakan dua faktor penting yang harus ada dalam proses belajar. Tidak seperti halnya para pendidik yang berpaham tradisional, para pendidik humanis tidak memisahkan antara ranah kognitif dan afektif. 5. Para pendidik humanis sangat menyakini bahwa sekolah harus menyediakan tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar. Jika mereka merasa nyaman, maka belajar menjadi lebih mudah dan bermakna)].⁷⁴

Kelima prinsip pendidikan dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan pendekatan humanis adalah berawal dari dalam diri si pelajar. Kemampuan dasar dan potensi yang dimiliki siswa adalah faktor internal dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan pendekatan humanis. Adanya saling paham dan saling merasakan terpenuhi kebutuhan menjadikan peserta didik terdorong untuk belajar. Kegiatan belajar yang berawal dari pribadi yang luhur dapat terpantul terhadap nilai-nilai kepribadian. Belajar dengan segala kemampuan yang dimiliki menjadikan peserta didik menemukan kenyamanan dan situasi belajar yang

⁷⁴Ronald G, *In the Footsteps of the Ancients*: The Origins of Humanism from Lovato to Bruni (Leiden: Boston, Köln: Brill, 2000), h. 234.

menyenangkan. Sehingga terciptalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dan kesemangatan.

9. Tujuan Kurikulum Berdasarkan Pendekatan Humanis

Pendidikan berdasarkan pendekatan humanis didasarkan kepada proses psikologis. Tujuan kurikulum berdasarkan pendekatan humanis sangatlah luas dan mempunyai makna tersendiri. Tujuan kurikulum berdasarkan pendekatan humanis didasarkan kepada peserta didik dan pendidik sebagai pusat dari pembelajaran yang bersifat psikologis. Peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang mampu menjadikan diri mereka memiliki proses latihan dan kontrol. Melalui pendekatan humanis peserta didik mampu menjadikan diri mereka dengan sesama peserta didik lainnya bertukar pikiran hingga menjadikan sebuah aktivitas yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik mempunyai ketertarikan tersendiri dalam dunia dan aktivitas belajar sehingga menciptakan pembelajaran yang terfokus dan mempunyai spesialisasi tersendiri.

Dalam hal ini pendidik dalam mencapai tujuan kurikulum berdasarkan pendekatan humanis mempercayai bahwa peserta didik mempunyai kemampuan tersendiri dalam memotivasi atau pun mendorong diri dalam mengikuti proses pembelajaran. Pendidik yakin bahwa peserta didik mampu mengikuti setiap kejadian yang ada dalam proses pembelajaran melalui topik-topik pembelajaran yang dibutuhkan dan diminati. Peserta didik selalu tertarik dan terfokus terhadap setiap pengetahuan dan ilmu yang dipelajari guna mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan.

Pendidik humanis percaya bahwa pembelajaran yang menyenangkan dan pengetahuan yang berkembang merupakan proses pembelajaran yang diharapkan peserta didik dan merupakan tujuan kurikulum yang hendak dicapai berdasarkan pendekatan humanis itu sendiri. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa pembelajaran yang

menyenangkan disebabkan kegiatan pembelajaran bertolak dari minat dan kebutuhan para peserta didik.⁷⁵

Pendidik humanis dapat mengembangkan pengetahuan peserta didik berdasarkan ranah kognitif dan afektif. Dalam hal ini kurikulum dijadikan sebagai salah satu aspek dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik sehingga pembelajaran terfokus dan bervariasi. Untuk itu pendidik humanis dapat melakukan evaluasi pembelajaran berdasarkan tingkatan yang dimiliki peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna. Evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan pendidik humanis dalam rangka mencapai tujuan kurikulum berdasarkan pendekatan humanis dengan pelaksanaan tes yang bersifat rutin. Tes yang rutin menjadikan peserta didik mengingat kembali topik pembelajaran yang diberikan sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Tes yang rutin juga dapat mengembangkan proses pembelajaran yang dilakukan pendidik, di mana pendidikan menjadikan proses pembelajaran sebagai kilas balik untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pendidik berperan sebagai fasilitator dan tutor di mana mampu memberika *support* dan pengertian kepada peserta didik dalam membuat suatu keputusan.

Disimpulkan bahwa pendidik dalam mencapai tujuan kurikulum berdasarkan pendekatan humanis dapat dilakukan dengan memberikan *support* bagi peserta didik dalam menggali ilmu dan pengetahuan serta mengembangkan penelitian. Pemberian dorongan atau *support* merupakan suatu kekuatan yang bersifat efektif bagi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pemberian dorongan atau *support* bagi peserta didik merupakan struktur pembelajaran yang bersifat kooperatif sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran secara keseluruhan guna mencapai level akademik yang lebih tinggi. Peserta didik yang termotivasi belajar berdasarkan pendekatan humanis mampu

⁷⁵Ibnu Hajar, *Panduan Lengkap Kurikulum Tematik untuk SD/MI* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 25.

menciptakan sikap disiplin yang bagus hingga mampu menjadikan diri sebagai panutan bagi setiap peserta didik lainnya.